



# LAPORAN KINERJA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020



# DAFTAR ISI

1

Kata Pengantar  
**Sambutan Gubernur**

2

**Ikhtisar Eksekutif**

33-73

Bab III  
**Capaian Kinerja**

5-21

Bab I  
**Pendahuluan**

75-77

Bab IV  
**Penutup**

23-31

Bab II  
**Perencanaan Kinerja**

79

**Lampiran**





**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Izinkan saya mengapresiasi semua yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini. Mereka bekerja dalam senyap dan tuntas, sehingga bisa menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu.

LKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam membangun Jakarta. Ini sudah menjadi komitmen kami. Untuk menjadi pemerintahan yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang utama dan pertama adalah keinginan untuk terbuka kepada siapa pun.

Dari aspek peraturan, LKIP ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari peraturan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2020 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Syukur alhamdulillah, di tengah berbagai kendala, pembangunan di Jakarta terus berlangsung. Bukan hanya infrastruktur fisik, melainkan juga infrastruktur sosial. Agar kemajuan di kota ini dan kebahagiaan warganya terwujud. Tentu kami tidak memungkiri ada satu-dua masalah di lapangan, tetapi ini akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2020. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai pihak yang ingin memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Jakarta, 31 Maret 2021

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2020. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan dari 10 Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Terjaminnya akses dan layanan Pendidikan, Kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Indeks Pembangunan Manusia	80,80	80,77	99,96
Berkurangnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	10,95	45,66
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan)*	100	100	100
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	83	88,2	106,3
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	3,18	4,69	67,8
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	6	4	175
Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih (%)	66,09	64,33	97,34
	Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	20	20,03	100,15
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/Public Transportation Modal Share (%)	25	8,2	32,8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	107,8	95	88,1
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai/Predikat AKIP	A	BB**	83,33
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,34	100,4
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	147	147	100

\*kedua indikator ini diperlakukan sebagai satu kesatuan

\*\*nilai tahun 2019 karena hingga saat penyusunan LKj ini nilai tahun 2020 belum dirilis

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu :

- ❖ 6 (enam) Indikator tercapai target
- ❖ 7 (tujuh) tidak tercapai, dengan satu diantaranya (skor evaluasi AKIP) masih menggunakan data capaian tahun 2019 karena belum adanya rilis resmi atas evaluasi tahun 2020.

Tidak tercapainya sejumlah indikator kinerja disebabkan oleh tekanan fiskal dan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dilakukannya refocusing anggaran. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan warga DKI Jakarta, meskipun berimplikasi pada tidak tercapainya sejumlah indikator kinerja.

Anggaran yang dialokasikan setelah refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk ke-13 IKU tersebut adalah sebesar Rp 11.254.371.891.892. Dari jumlah tersebut, telah direalisasikan senilai Rp 10.589.436.845.463 atau 94,09%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar 5,52%, atau setara dengan nilai efisiensi dalam skala 0-100% yaitu sebesar 64,08%.

Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya 35 program prioritas. Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa mendatang.



# BAB I

# PENDAHULUAN

# LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah salah satu media yang menginformasikan mengenai Perencanaan Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.



## Dasar Hukum terkait Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi DKI Jakarta

**UU RI No. 23 Th 2014  
Tentang  
Pemerintah Daerah**

**PP No 29 Th 2014 tentang  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintahan**

**PermenPAN dan RB  
Nomor 53 Tahun  
2014 tentang  
Petunjuk Teknis  
Perjanjian Kinerja,  
Pelaporan Kinerja  
dan Tata Cara Reviu  
atas LKIP**

**Keputusan Gubernur No 280  
Th 2020  
"Perjanjian Kinerja  
Pemerintah Provinsi DKI  
Jakarta Tahun 2020"**

**Intruksi Gubernur No 108 Th  
2020  
"Penyusunan Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta Tahun 2020"**

# TUJUAN & MANFAAT

## TUJUAN

1

Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat

2

Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

## MANFAAT

Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020



Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang



# GAMBARAN PROVINSI DKI JAKARTA

## KEDUDUKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

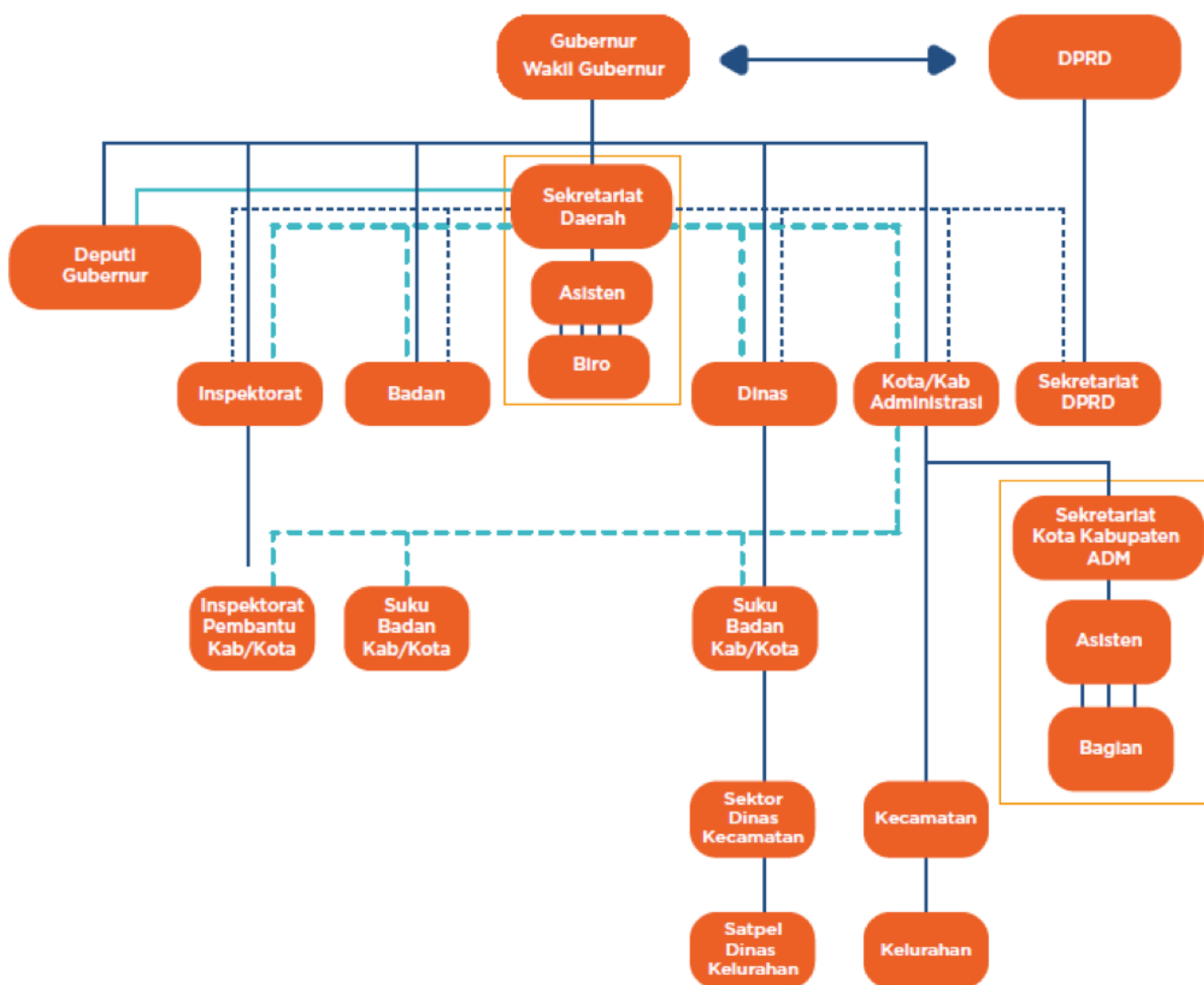
Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

## KONDISI PEMERINTAHAN

Kedudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)



# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 susunan kelembagaan tersebut efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017 hingga sampai saat ini. Adapun struktur organisasinya seperti gambar diatas.

# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah serta kekhususannya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan Satpol PP.



**Sekretariat Daerah**

Tugas :

Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

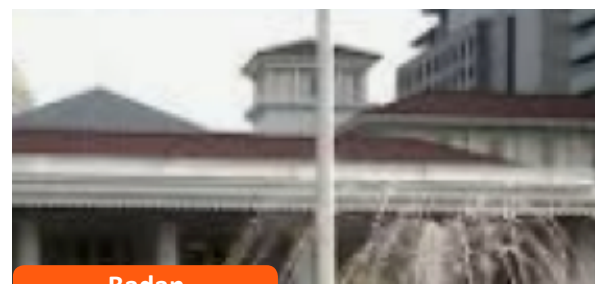
Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur daerah;
5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;
6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintahan Daerah;
7. Pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas dan pelaporan Perangkat Daerah;
8. Penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama daerah dan protokol.

9. Fasilitasi dan pengoordinasian fungsi perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial serta mental spiritual; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sekretariat Daerah mempunyai 4 (empat) orang Asisten yang mempunyai tugas koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- Pemerintahan
- Perekonomian dan Keuangan
- Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Kesejahteraan Rakyat



**Badan**

Dipimpin :

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Pelaksanaan tugas Gubernur terkait dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan, yaitu: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian,



Sekretariat DPRD

Dipimpin :

1 orang Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Menyelenggarakan seluruh administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya.



Inspektorat

Dipimpin :

1 (satu) orang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas :

Mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.



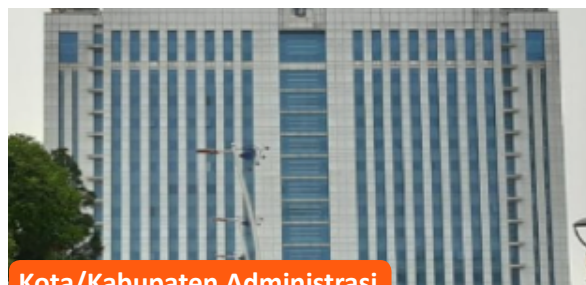
Dinas Daerah

Dipimpin :

Kepala Dinas atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tugas :

Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, meliputi urusan Pemerintahan wajib dan pilihan.



Kota/Kabupaten Administrasi

Dipimpin :

Walikota/Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

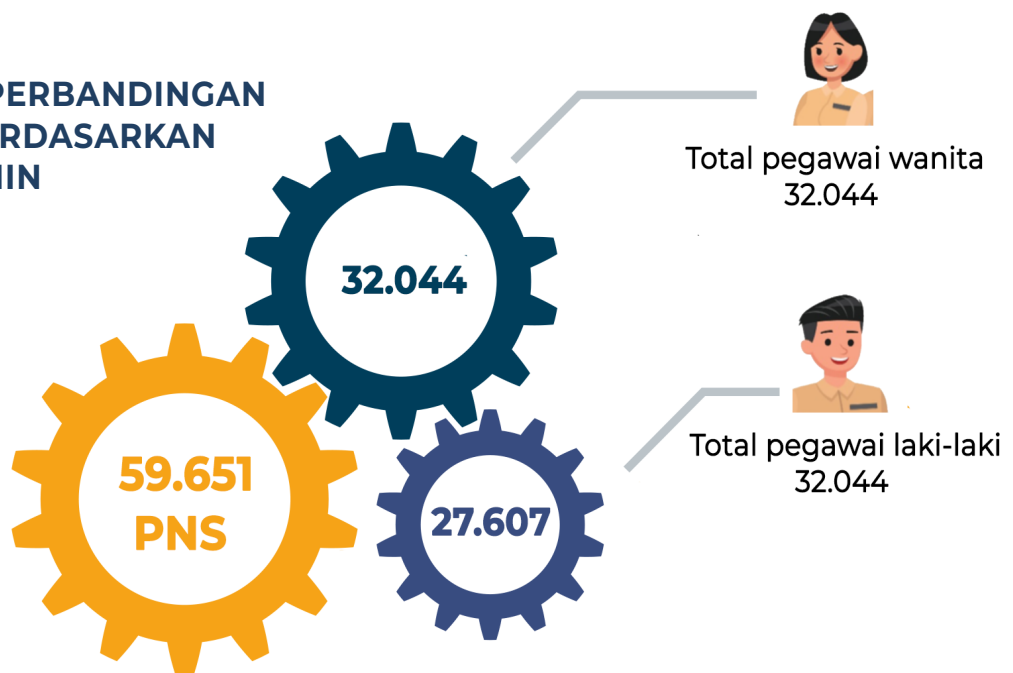
Tugas :

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, membina 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

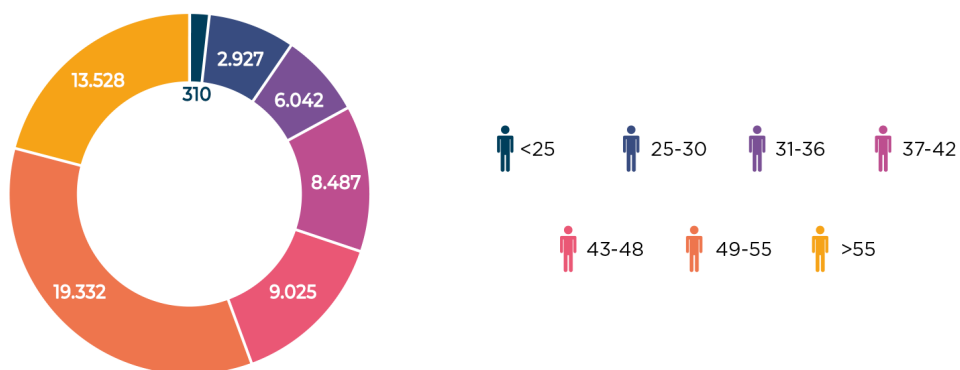
# PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 mempunyai personil/pegawai negeri sipil berjumlah 59.651 pegawai.

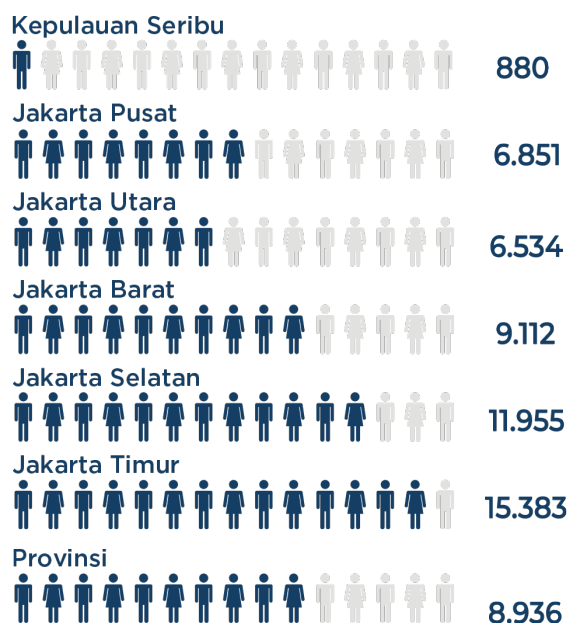
## KOMPOSISI PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



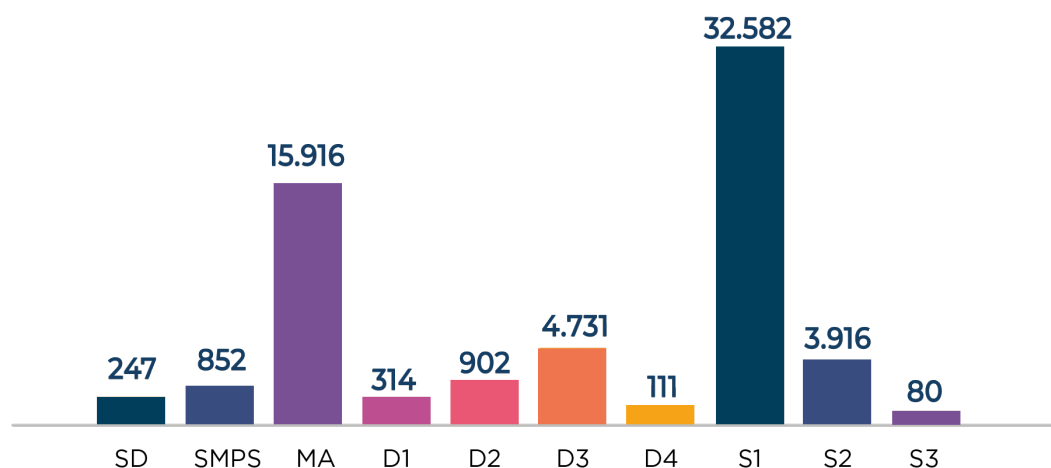
## JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA



## JUMLAH PNS BERDASARKAN PENEMPATAN TUGAS



## JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN



# CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi 2020-2024 memiliki 3 (tiga) sasaran utama yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel; dan pelayanan publik yang prima. Reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah/unit perangkat daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan misi ketiga tersebut. Tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, maka telah dilakukan langkah – langkah perbaikan – perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan – pungutan liar terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu:

No	Langkah-Langkah
1	Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
2	Penyusunan road map Reformasi birokrasi telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
3	Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020 tentang Budaya Kerja, sehingga ASN di Pemprov DKI Jakarta memiliki sikap serta perilaku serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik guna mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
4	Telah dilakukan identifikasi dan harmonisasi atas produk hukum, penguatan penyusunan policy paper, naskah akademis, dan produk hukum yang mendukung aturan seperti regulasi penanganan covid 19, serta pembuatan sistem e-perbal, simplifikasi regulasi perizinan
5	Evaluasi kelembagaan yang dilakukan berdasarkan Permen PANRB Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
6	Telah selesainya penyusunan peta proses bisnis untuk level Provinsi dan level Perangkat Daerah
7	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan telah dilaksanakan pada level JPT, dan menunggu validasi dari Kementerian PANRB, sedangkan untuk jabatan administrator dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021
8	Telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai sehingga ada penyelarasan antara ukuran kinerja organisasi dengan kinerja individu telah dimulai dengan penyusunan renkin serta integrasi antara e-SKP, e-Sakip dan e-TPP dan apresiasi sesuai sumbangsih pegawai terhadap organisasi

No	Langkah-Langkah
9	Melaksanakan Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembinaan dan pengawasan melalui aplikasi siperisai ( <a href="https://siperisai.jakarta.go.id/">https://siperisai.jakarta.go.id/</a> )
10	Optimalisasi penerapan penanganan gratifikasi melalui aplikasi cetak gol ( <a href="https://cetakgol.jakarta.go.id/">https://cetakgol.jakarta.go.id/</a> ) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi
11	Telah melakukan survei mandiri terhadap kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan perangkat daerah dengan nilai IKM sebesar 86,34
12	Mengoptimalkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP)
13	Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel melalui optimalisasi penggunaan aplikasi berbasis elektronik serta Integrasi aplikasi perizinan-perizinan seperti Si Tatan (SIUP TDP Simultan 6 Jam), Pelitas (perizinan lintas batas) dan website ke dalam satu kanal perizinan yaitu aplikasi JakEvo dan pendirian Mal Pelayanan publik yang mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non perizinan baik pusat dan daerah di suatu tempat atau One-Stop Service dengan 328 Perizinan DPMPTSP dan 13 Kementerian / Lembaga / BUMN
14	Pengintegrasian data Kebijakan Pelayanan melalui Aplikasi Jakarta Satu “satu peta,- satu data, satu kebijakan”
15	Integrasi Layanan Transportasi Jak Lingko terintegrasi dengan Bus Rapid Transit (BRT)
16	Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan hukum serta pelaporan dengan optimalisasi aplikasi dalam website BPAD seperti diantaranya Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset (Siera), eRKBMD untuk perencanaan kebutuhan BMD,
17	Peningkatan dan pengembangan SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan) dalam mengelola penerimaan pendapatan daerah,
18	Penguatan penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) untuk menampung dan menindaklanjuti laporan warga melalui 14 (empat belas) kanal pengaduan yang terintegrasi sehingga aduan masyarakat dapat diselesaikan lebih cepat,
19	Semua pembayaran retribusi perizinan dan non-perizinan melalui transaksi nontunai untuk menghindari pungutan liar (pungli),
20	Ditetapkan 8 Unit Perangkat Daerah sebagai unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PANRB yaitu Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (L2HD), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dan Penyelamatan (Pusdiklatkarlambat), Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (Pusyankes wannak), Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm Jakarta Pusat, UP PKB Kedaung Angke, dan
21	Penanganan Pandemi Covid-19 menggunakan teknologi informasi yang berdasarkan keakuratan data dan selalu diperbaharui dan transparan, semua informasi terkait penanganan Pandemi Covid-19, sistem kesehatan hingga kebijakan dapat diakses melalui <a href="https://corona.jakarta.go.id/id">https://corona.jakarta.go.id/id</a> dan media sosial serta kolaborasi sosial berskala besar antara Pemprov DKI Jakarta dan Masyarakat

# KONDISI PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

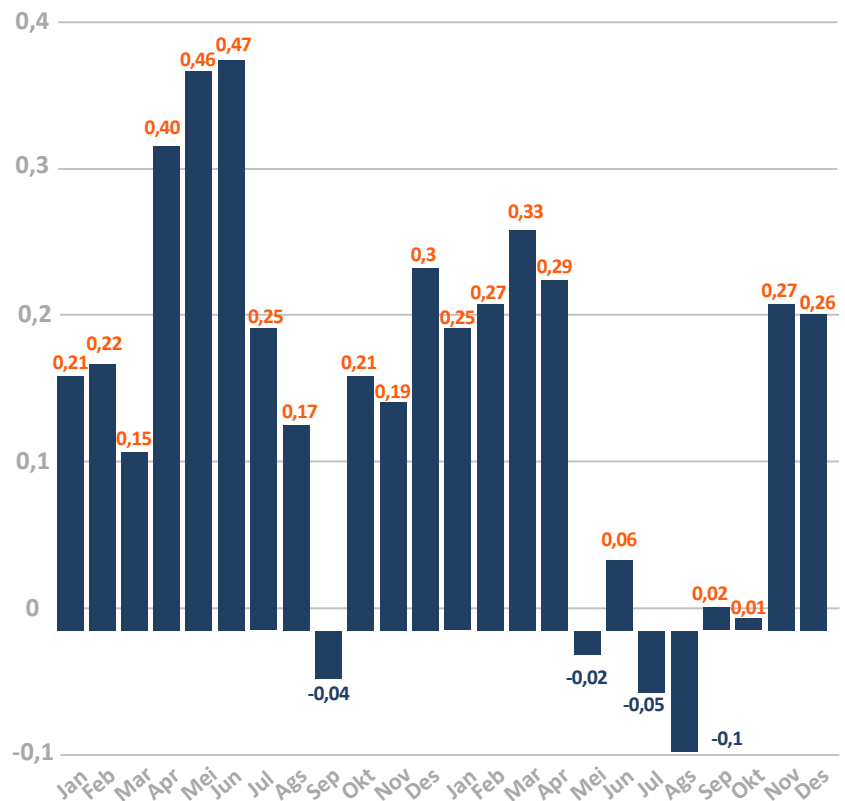
Inflasi Jakarta pada bulan Desember tercatat 0.26 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi bulan yang sama tahun sebelumnya 0.30 persen. Demikian juga dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya 0.277 persen, maka inflasi bulan ini sedikit mengalami penurunan.



Inflasi tahunan 2020, (Desember 2019-Desember 2020) 1,59 persen, sedikit menurun jika dibandingkan dengan laju inflasi tahunan bulan sebelumnya 1,66 persen. Akan tetapi angka ini masih jauh dibawah laju inflasi tahunan periode yang sama tahun sebelumnya (Desember 2018 – Desember 2019) yang mencapai 3.23 persen.

Pandemi covid-19 merubah pola inflasi tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Pola inflasi menjadi tidak lagi sama trennya seperti tahun-tahun sebelumnya. Selama ini puncak inflasi dalam satu tahun terjadi pada bulan yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Seperti halnya tahun 2019.

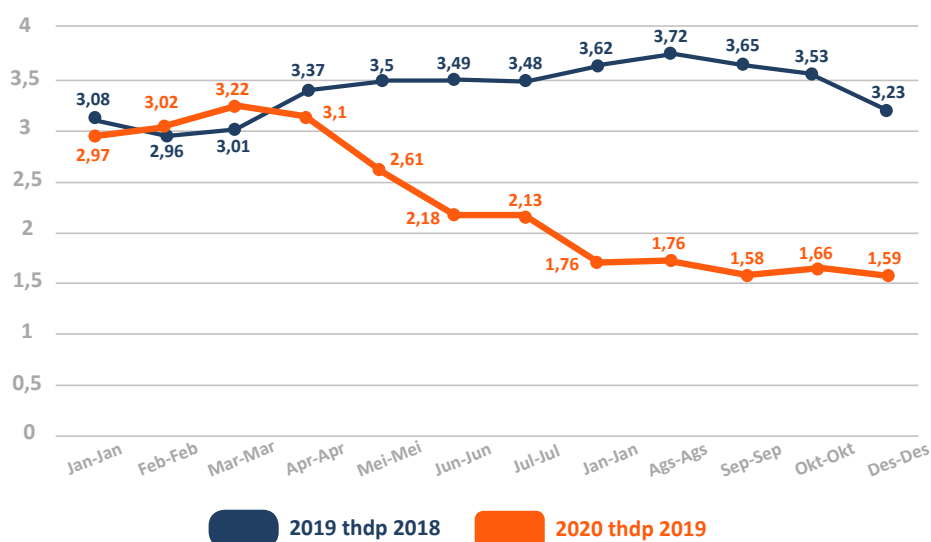
Akan tetapi yang terjadi di 2020 adalah penurunan inflasi secara drastis justru terjadi pada bulan Mei saat Hari Raya Idul Fitri. Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran virus corona yang mulai diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 10-23 April 2020, sangat berpengaruh terhadap permintaan atau daya beli masyarakat



Aktifitas ekonomi yang turun dapat dilihat dari angka inflasi yang cukup rendah selama bulan Mei – Oktober 2020 di bawah 0.1 persen. Kondisi ini juga ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II dan III yang berkontraksi minus 8.22 persen (yoy).

Geliat pertumbuhan perekonomian mulai bisa dirasakan memasuki bulan November 2020.

Pertengahan Oktober PSBB terjadi kelonggaran dengan aturan transisi PSBB. Kebijakan tersebut sangat efektif untuk menaikkan kemampuan dan daya beli masyarakat Jakarta yang ditunjukkan melalui inflasi yang cukup tinggi dari 0.01 persen pada Oktober menjadi 0.27 persen pada November dan sedikit melambat di Desember 0.26 persen.



### Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Desember 2020 30 Kota Inflasi (2018 = 100)

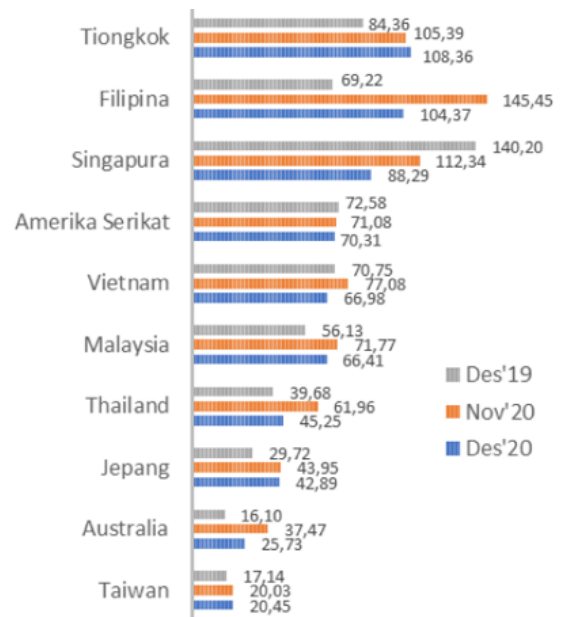
No	Kota	Peringkat	Desember 2020 IHK	Tingkat Inflasi (%)	No	Kota	Peringkat	Desember 2020 IHK	Tingkat Inflasi (%)
1	Meulaboh	10	109,12	1,02	16	Palembang	36	104,62	0,58
2	Banda Aceh	17	105,93	0,85	17	Lubuklinggau	59	105,08	0,39
3	Lhokseumawe	6	106,61	1,27	18	Bengkulu	85	104,33	0,14
4	Sibolga	4	106,17	1,32	19	Bandar Lampung	29	106,36	0,67
5	Pematangsiantar	3	105,55	1,47	20	Metro	42	106,31	0,51
6	Medan	31	104,15	0,65	21	Tanjung Pandan	2	106,64	1,49
7	Padangsidempuan	12	107,08	1,00	22	Pangkalpinang	24	103,44	0,71
8	Gunungsitoli	1	107,85	1,87	23	Batam	9	104,67	1,05
9	Padang	23	105,38	0,71	24	Tanjung Pinang	13	104,80	0,98
10	Bukittinggi	58	104,82	0,39	25	DKI Jakarta	75	105,96	0,26
11	Tembilahan	66	106,26	0,34	26	Bogor	53	107,12	0,44
12	Pekanbaru	41	104,90	0,51	27	Sukabumi	37	105,65	0,58
13	Dumai	19	105,94	0,80	28	Bandung	60	105,69	0,39
14	Bungo	39	105,94	0,56	29	Cirebon	44	103,34	0,49
15	Jambi	22	106,23	0,72	30	Bekasi	21	108,03	0,73

# EKSPOR

Berdasarkan berita resmi statistik No.8/02/31/Th.XXIII, 1 Februari 2021

Sepanjang Desember 2020, Ekspor DKI Jakarta terpantau senilai 876.72 juta dollar Amerika, turun 8.75% dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, dibanding Desember tahun 2019 terjadi peningkatan 0.81%

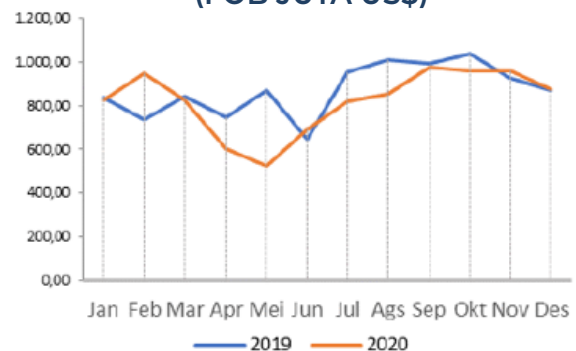
Berbeda dengan bulan sebelumnya maupun bulan yang sama tahun lalu, ekspor Jakarta di penghujung tahun 2020 didominasi oleh ekspor ke Tiongkok. Ekspor ke negeri Tirai Bambu tersebut senilai 108.36 juta dollar Amerika, tertinggi dibanding dengan ekspor DKI Jakarta ke negara-negara lainnya. Selama tahun 2020, ekspor ke Tiongkok telah dua kali mendominasi ekspor DKI Jakarta yaitu pada Oktober dan Desember 2020, begitu pula ekspor ke Filipina mendominasi pada September dan November 2020, selebihnya ekspor Jakarta didominasi oleh Singapura.



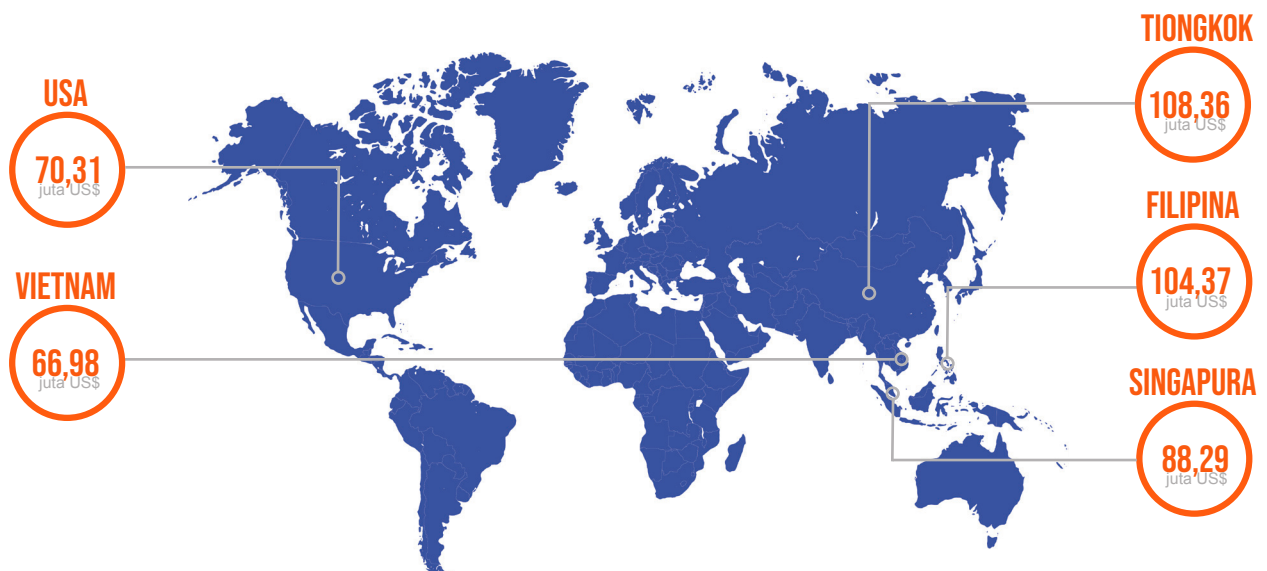
## KOMODITAS UNGGULAN ESKPOR DKI JAKARTA



## EKSPOR DKI JAKARTA 2019 DAN 2020 (FOB JUTA US\$)



## 5 NEGARA TUJUAN UTAMA



## TABEL ESKPOR DKI JAKARTA

Tahun/Bulan	Nilai (FOB juta dollar)	Perubahan (%)		Kumulatif s/d bulan ini	
		Terhadap bulan lalu	Terhadap bulan yang sama tahun lalu	Nilai (FOB Juta Dollar)	Perubahan terhadap periode yang sama
<b>2019</b>					
Januari	883.97	10.77	4.73	838.97	4.73
Februari	736.79	-12.18	-3.23	1,575.76	0.85
Maret	842.59	14.36	-6.05	2,418.36	-1.67
April	752.06	-10.75	-13.02	3,170.41	-4.62
Mei	873.59	16.16	-7.65	4,044.00	-5.29
Juni	651.01	-25.48	11.36	4,695.01	-3.29
Juli	953.65	46.49	6.93	5,648.66	-1.70
Agustus	1,011.73	6.09	10.98	6,660.39	0.04
September	991.98	-1.95	24.98	7,652.37	2.69
Oktober	1,036.42	4.48	15.62	8,688.79	4.08
November	927.98	-10.46	10.88	9,616.77	4.70
Desember	896.66	-6.28	14.51	10,486.44	5.45
<b>2020</b>					
Januari	827.16	-4.89	-1.41	827.16	-1.41
Februari	950.70	14.94	29.03	1,777.87	12.83
Maret	826.33	-13.08	-1.93	2,604.20	7.68
April	605.17	-26.76	-19.53	3,209.37	1.23
Mei	521.75	-13.78	-40.27	3,731.12	-7.74
Juni	692.83	32.79	6.42	4,423.95	-5.77
Juli	819.44	18.28	-14.07	5,243.39	-7.17
Agustus	852.94	4.09	-15.69	6,096.34	-8.47
September	977.10	14.56	-1.50	7,073.43	-7.57
Oktober	960.82	-1.67	-7.30	8,034.25	-7.53
November	960.75	-0.01	3.53	8,995.00	-6.47
Desember	876.72	-8.75	0.81	9,871.72	-5.86

## EKSPOR DKI JAKARTA BERDASARKAN NEGARA TUJUAN UTAMA, DESEMBER 2020

No	Negara Tujuan Ekspor	Nilai (FOB Juta US\$)			% Perubahan		Peran terhadap total Des'20
		Des '19	Nov '20	Des '20	Des'20 terhadap Nov'20	Des'20 terhadap Des'19	
1	Tiongkok	84.36	105.39	108.36	2.81	28.45	12.36
2	Filipina	69.22	145.45	104.37	-28.24	50.77	11.90
3	Singapura	140.20	112.34	88.29	-21.41	-37.03	10.07
4	Amerika Serikat	72.58	71.08	70.31	-1.08	-3.12	8.02
5	Vietnam	70.75	77.08	66.98	-13.10	-5.33	7.64
6	Malaysia	56.13	71.77	66.41	-7.46	18.33	7.58
7	Thailand	39.68	61.96	45.25	-26.97	14.05	5.16
8	Jepang	29.72	43.95	42.89	-2.42	44.32	4.89
9	Australia	16.10	37.47	25.73	-31.32	59.79	2.93
10	Taiwan	17.14	20.03	20.45	2.09	19.34	2.33
Total 10 Negara		595.87	746.53	639.05	-14.40	7.25	72.89
Lainnya		273.79	214.23	237.67	10.94	-13.19	27.11
Total Ekspor DKI Jakarta		869.66	960.75	876.72	-8.75	0.81	100.00

# IMPOR

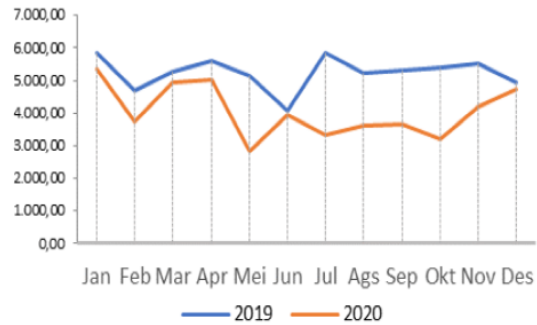


Berdasarkan berita resmi statistik No.8/02/31/Th.XXIII, 1 Februari 2021

Nilai Impor Jakarta selama Desember 2020 tercatat senilai 4.740,84 juta Us\$ Amerika, naik 12,65% terhadap bulan sebelumnya, namun bila dibandingkan Desember tahun lalu, impor Jakarta bulan ini lebih rendah 4,11%. Sementara secara kumulatif impor DKI Jakarta selama tahun 2020 termonitor sebesar 48.552,49 juta Us\$ Amerika, turun 22,73% dari tahun 2019. Turunnya impor Jakarta terhadap tahun lalu terjadi setiap bulan sepanjang tahun lalu terjadi di setiap bulan sepanjang tahun 2020 seperti pada grafik disamping.

Dilihat dari negara pemasoknya, impor Jakarta Desember 2020 didominasi barang asal Tiongkok. Impor dari negeri Tirai Bambu tersebut mencapai 1.678,61 juta Us\$, 35,41% dari total impor Jakarta, Impor asal Tiongkok ini meningkat 15,15% dibanding bulan lalu dan juga lebih tinggi 2,74% dari Desember 2019. Sepanjang tahun 2020.

## IMPOR DKI JAKARTA 2019 DAN 2020 CIF JUTA US\$



## KOMODITAS UTAMA IMPOR JAKARTA ASAL TIONGKOK



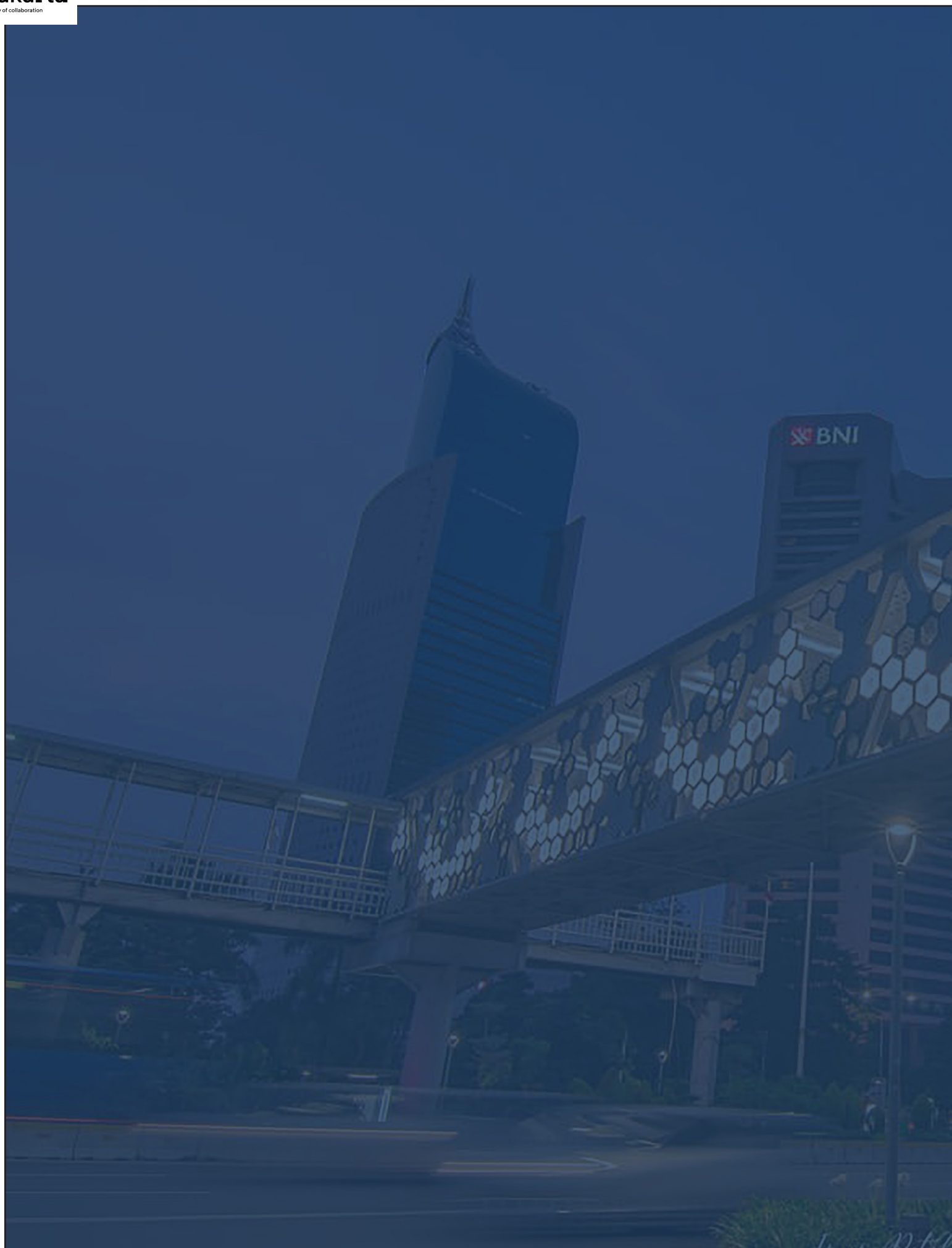
Impor DKI Jakarta adalah impor barang melalui pelabuhan muat DKI Jakarta yang alamat dan tujuan akhirnya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di wilayah DKI Jakarta seperti KPPBC Tanjung Priok, Halim Perdana Kusuma, Kantor Pos Pasar Baru dan Sunda Kelapa/Marunda. Perlu diketahui bahwa barang-barang yang diimpor melalui pelabuhan muat DKI Jakarta tidak seluruhnya memiliki tujuan akhir pengiriman KPPBC Jakarta, namun adapula yang tujuannya untuk provinsi lain.

### TABEL IMPOR DKI JAKARTA

Tahun/Bulan	Nilai		Perubahan (%)		Kumulatif s/d bulan ini	
	(CIF juta dollar)	Terhadap bulan lalu	Terhadap bulan yang sama tahun lalu	Nilai (FOB Juta Dollar)	Perubahan terhadap periode yang sama	
<b>2019</b>						
Januari	5,863.58	-	-	5,863.58	-	
Februari	4.703.33	-19.79	-	10,566.90	-	
Maret	5,250.23	11.63	-	15,817.13	-	
April	5,588.77	6.45	-	21,405.90	-	
Mei	5,125.88	-8.28	-	26,531.78	-	
Juni	4,081.97	-20.37	-	30,613.75	-	
Juli	5,840.43	43.08	-	36,454.18	-	
Agustus	5,223.30	-10.57	-	41,677.48	-	
September	5,307.95	1.62	-	46,985.42	-	
Oktober	5,398.65	1.71	-	52,384.08	-	
November	5,503.61	2.94	-	57,887.68	-	
Desember	4,944.29	-10.16	-	62,831.97	-	
<b>2020</b>						
Januari	5,366.64	8.54	-8.48	5,366.64	-8.48	
Februari	3,743.99	-30.24	-20.40	9,110.63	-13.78	
Maret	4,928.51	31.64	-6.13	14,039.13	-11.24	
April	5,007.02	1.59	-10.41	19,046.15	-11.02	
Mei	2,818.02	-43.72	-45.02	21,864.17	-17.59	
Juni	3,955.74	40.37	-3.09	25,819.92	-15.66	
Juli	3,331.77	-15.77	-42.95	29,151.68	-20.03	
Agustus	3,607.80	8.28	-30.93	32,759.48	-21.40	
September	3,641.29	0.93	-31.40	36,400.77	-22.53	
Oktober	3,202.59	-12.05	-40.68	39,603.36	-24.40	
November	4,208.30	31.40	-23.54	43,811.66	-24.32	
Desember	4,740.84	12.65	-4.11	48,552.49	-22.73	

### IMPOR DKI JAKARTA BERDASARKAN NEGARA TUJUAN UTAMA, DESEMBER 2020

No	Negara Asal Impor	Nilai (CIF Juta US\$)			% Perubahan		Peran terhadap total Des'20
		Des '19	Nov '20	Des '20	Des'20 terhadap Nov'20	Des'20 terhadap Des'19	
1	Tiongkok	1,633.76	1,457.81	1,678.61	15.15	2.74	35.41
2	Jepang	665.72	475.99	439.60	-7.65	-33.97	9.27
3	Thailand	407.31	338.62	374.53	10.60	-8.05	7.90
4	Republik Korea	249.09	230.15	275.18	19.56	10.47	5.80
5	Amerika Serikat	244.83	203.64	212.52	4.36	-13.20	4.48
6	Singapura	262.08	184.53	197.61	7.09	-24.60	4.17
7	India	180.93	183.29	186.65	1.83	3.16	3.94
8	Malaysia	202.34	152.20	174.44	14.61	-13.79	3.68
9	Perancis	59.26	40.61	157.13	286.89	165.17	3.31
10	Vietnam	125.19	109.87	129.57	17.93	3.50	2.73
Total 10 Negara		4,030.50	3,376.72	3,825.84	13.30	-5.08	80.70
Lainnya		913.78	831.58	915.00	10.03	0.13	19.30
Total Impor DKI Jakarta		4,944.29	4,208.30	4,740.84	12.65	-4.11	100.00



# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

# RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Dalam RPJMD tersebut telah dituangkan 38 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Dalam perjalanannya, refocusing IKU dilakukan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1960 Tahun 2018 yang memprioritaskan kinerja utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 ke dalam 13 IKU. Indikator-indikator yang telah difokuskan ulang inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Gubernur. Pada tahun 2020, perjanjian kinerja Gubernur DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2020.



Peraturan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta Nomor 1 Tahun  
2018 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD)  
Tahun 2017-2022

Keputusan Gubernur Nomor  
1960 Tahun 2018 tentang  
Indikator Kinerja Utama  
Pemerintah Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Tahun  
2017-2022

Keputusan Gubernur Nomor  
280 Tahun 2020 tentang  
Perjanjian Kinerja Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta Tahun  
2020

Pada tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sasaran Strategis akan dijadikan tolok ukur dalam ukuran keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan visi dan misi.

# VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN

## VISI

“  
**Jakarta Kota  
Maju, Lestari dan  
Berbudaya yang  
Warganya terlibat  
dalam Mewujudkan  
Keberadaan, Keadilan  
dan Kesejahteraan  
bagi Semua**  
”

Keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi pondasi yang penting dalam melakukan pembangunan. Tidak hanya fisik seperti infrastruktur yang modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan semua warga. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

## MISI

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinnekaan

Berdasarkan visi, misi, dan isu-isu strategis yang ada, maka dalam RPJMN Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sebagai berikut.

### Misi 1

Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan.

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial
	Terwujudnya pembangunan kota yang mengutamakan kesetaraan gender serta ramah perempuan dan anak
	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana
Mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat, dan berkarya	Terjaminnya akses dan layanan Pendidikan serta Kesehatan yang berkualitas bagi semua
	Terwujudnya keluarga yang sejahtera

### Misi 2

Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesempatan kerja	Berkurangnya tingkat pengangguran
Meningkatnya kewirausahaan yang kreatif dan produktif	Meningkatnya kewirausahaan baru
Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat
Mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat	Terwujudnya pengurangan tingkat kesenjangan sosial masyarakat
	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat
Mempercepat pembangunan infrastruktur yang andal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi
	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua masyarakat Jakarta
	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

### Misi 3

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas.

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat

### Misi 4

Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya pembangunan kota yang berwawasan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) Melambatnya penurunan muka air tanah Terwujudnya Kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana dan prasarana pendukungnya

### Misi 5

Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebhinnekaan.

Tujuan	Sasaran
Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat
Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama dan ras dan latar belakang lainnya
Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinnekaan dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional Terwujudnya pelestarian kebudayaan Terwujudnya pelestarian cagar budaya

# PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2020 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1			
Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,80

Sasaran Strategis 2			
Berkurangnya tingkat pengangguran			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	5,00%

Sasaran Strategis 3			
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase	Ketersediaan 100%
3.1.	Indeks Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83

Sasaran Strategis 4			
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	3,18%

Sasaran Strategis 5			
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi			
	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1.	Jumlah Titik Genangan Banjir	Titik	6

### Sasaran Strategis 6

Meningkatnya akses sanitasi layak

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1.	Cakupan pelayanan air bersih	persentase	66,09%
6.2.	Persentase penurunan volume sampah di kota	Persentase	20%

### Sasaran Strategis 7

Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1.	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	persentase	25%

### Sasaran Strategis 8

Meningkatnya pertumbuhan investasi

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1.	Realisasi Nilai Investasi	Triliun	107,8 triliun

### Sasaran Strategis 9

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1.	Nilai/Predikat AKIP	Predikat	A
9.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00
9.3.	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP

### Sasaran Strategis 10

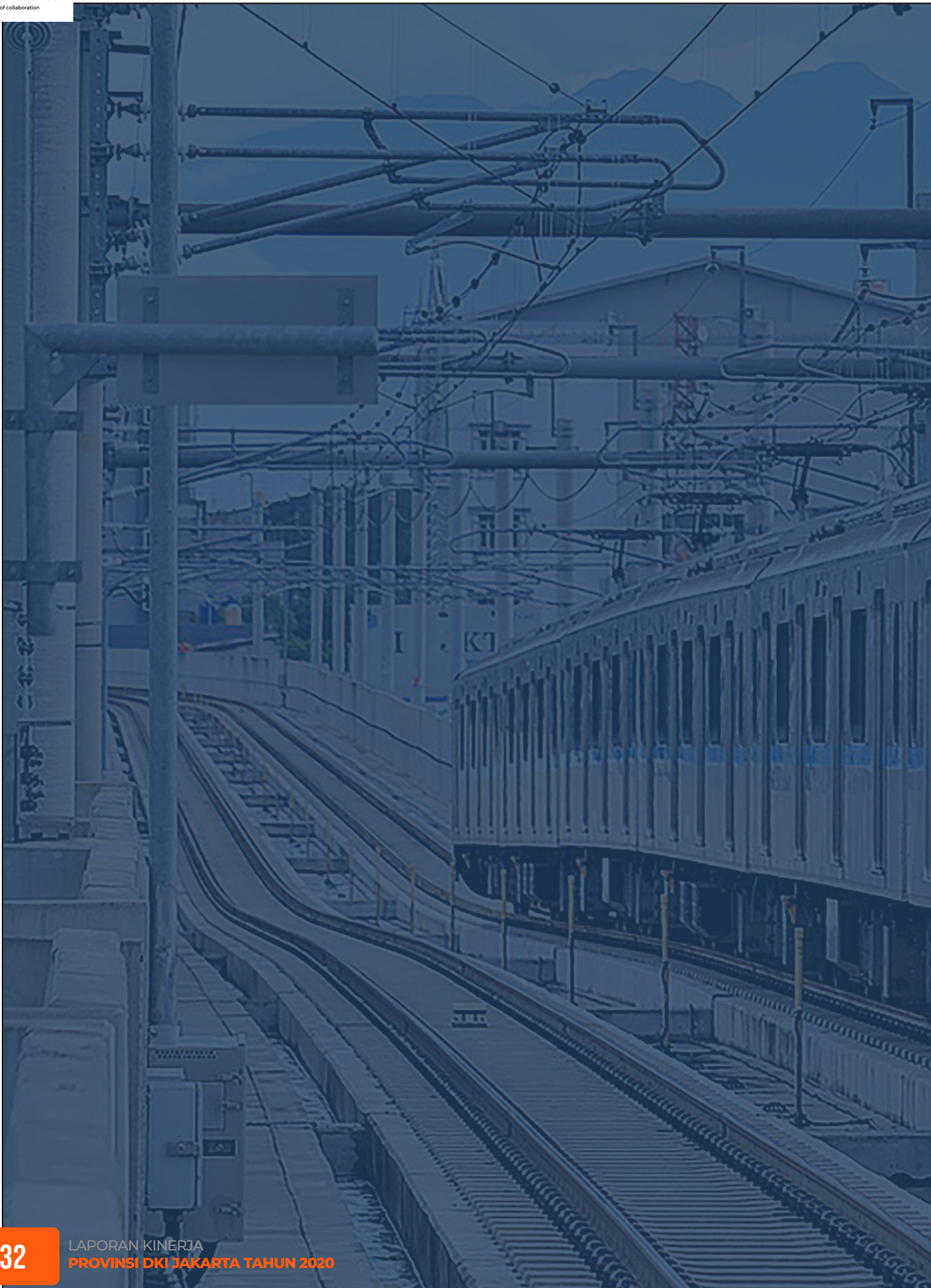
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10.1.	Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	RW	147

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan capaian target kinerja pada Tahun 2020 tersebut telah menyiapkan APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 79.610.435.317.743 adapun dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 sehingga dilakukan rasionalisasi APBD refocusing pada Tahun 2020 sehingga APBD menjadi sebesar Rp. 63.303.092.958.713 (enam puluh tiga triliun tiga ratus tiga miliar Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), adapun yang digunakan untuk melaksanakan program-program terkait indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Program	Pagu (ribu rupiah)
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	12.138.243
2	Program Wajib Belajar 12 Tahun	1.930.073.275
3	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	5.519.454
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	29.506.441
5	Program pengembangan Guru dan Tenaga Pendidikan	1.393.917.285
6	Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	5.335.274.518
7	Program pelayanan dan pengembangan perpustakaan	12.547.860
8	Program penyadaran, pemberdayaan, pengembangan Pemuda dan Pramuka	1.626.294
9	Program pengembangan dan pembinaan olahraga	240.616.882
10	Program pemberdayaan masyarakat	542.400
11	Program pengembangan Upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	3.306.265.802
12	Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah	2.124.492.752
13	Program peningkatan prasarana dan sarana bidang kesehatan	379.080.384
14	Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	73.146.291
15	Program pembinaan dan penempatan tenaga kerja	10.650.800
16	Program penciptaan hubungan industrial yang harmonis	1.149.795
17	Program peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan	53.990
18	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	12.837.632
19	Program pengelolaan kelautan dan perikanan	154.143.103
20	Program pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	30.170.700
21	Program penanganan Fakir Miskin	49.768.986
22	Program pengendali banjir dan abrasi	99.001.217
23	Program pengembangan dan pengelolaan Air Bersih	27.240.597
24	Program pengelolaan persampahan	1.348.399.483
25	Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum	91.641.694
26	Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan dan kepelabuhan	13.572.593
27	Program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan	35.663.216
28	Program peningkatan penanaman modal	3.172.290
29	Program pembinaan dan pengembangan BUMD	1.296.632
30	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	6.085
31	Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.159.788
32	Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	244.943
33	Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah	19.177.260
34	Program pemanfaatan aset daerah	353.903
35	Program penataan kawasan permukiman	19.720.816





# BAB III

# CAPAIAN

# KINERJA

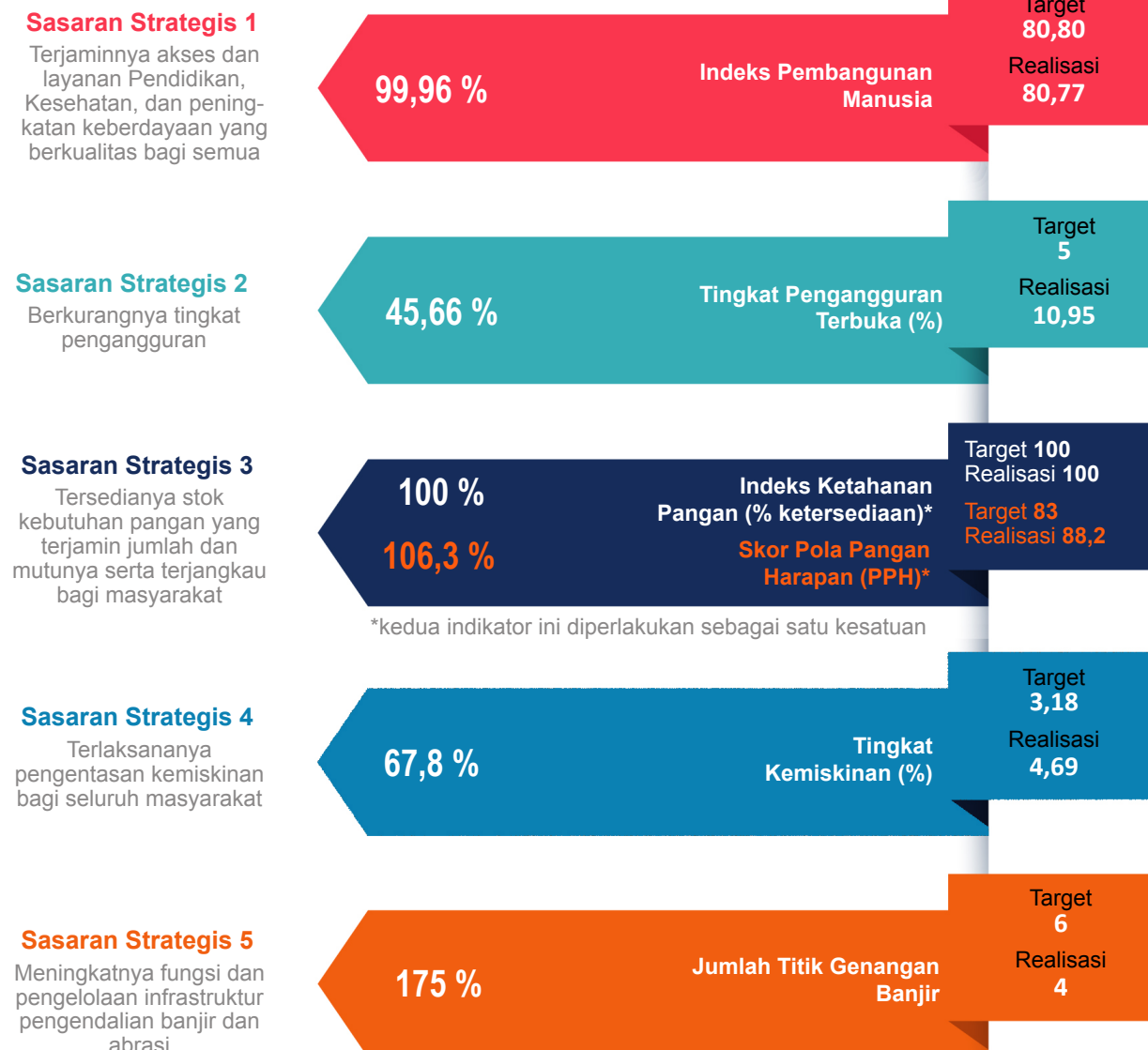
# CAPAIAN KINERJA

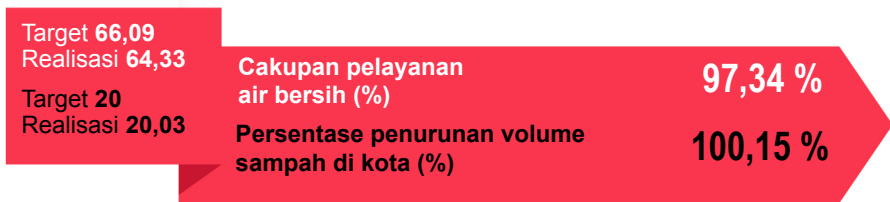
Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi

tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2020 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 10 Sasaran dan 13 Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2020. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

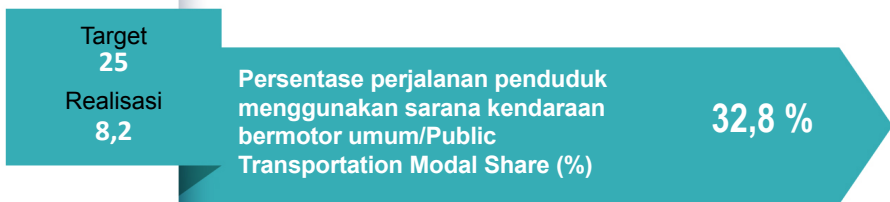
## REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020





**Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya akses sanitasi layak



**Sasaran Strategis 7**

Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga



**Sasaran Strategis 8**

Meningkatnya pertumbuhan investasi



**Sasaran Strategis 9**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel



**Sasaran Strategis 10**

Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

\*\*nilai tahun 2019 karena hingga saat penyusunan LKj ini nilai tahun 2020 belum dirilis

Berdasarkan grafik di atas, dari 13 indikator kinerja utama yang diperjanjikan pada tahun 2020, sebanyak 6 (enam) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 7 (tujuh) indikator belum dapat direalisasikan sesuai

target yang ditetapkan. Akan tetapi, dilihat dari tren realisasi selama periode RPJMD yang berlaku, pada dasarnya sebagian besar indikator menunjukkan progres realisasi yang positif, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Utama 2018-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	2018	2019	2020
Terjaminnya akses dan layanan Pendidikan, Kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Indeks Pembangunan Manusia	80,47	80,76	80,77
Berkurangnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	6,54	10,95
Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan)	100	100	100
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,5	90,8	88,2
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	3,55	3,42	4,69
Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Jumlah Titik Genangan Banjir	11	5	4
Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan pelayanan air bersih (%)	60,33	63,16	64,33
	Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	12,4	17,08	20,03
Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/Public Transportation Modal Share (%)	15	21,7	8,2
Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	114,2	123,9	95
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai/Predikat AKIP	BB	BB	BB*
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,76	84,41	86,34
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	217	157	147

Selama kurun waktu perencanaan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, indikator-indikator kinerja utama yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Gubernur memperlihatkan catatan perbaikan. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal triwulan II tahun 2020 mengakibatkan perlambatan ekonomi secara signifikan pada tingkat global dan turut berimbas pada perekonomian Indonesia dan DKI Jakarta. Akibatnya, target pada indikator-indikator yang berkaitan dengan ekonomi seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan realisasi nilai investasi menjadi sangat sulit dicapai dan justru menurun dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tekanan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 juga membuat sebagian indikator kinerja bergerak menjauh dari target jangka menengah yang ditetapkan hingga tahun 2022, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan yang pada tahun-tahun sebelumnya telah berhasil diturunkan kembali mengalami peningkatan seiring dengan tekanan ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. DKI Jakarta sebagai daerah perkotaan yang ditopang oleh perekonomian perkantoran (office economy) mengalami tekanan ekonomi paling signifikan akibat dibatasinya mobilitas penduduk terutama di perkantoran.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Hingga Tahun 2020 dan Target Jangka Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja dan Satuan	Realisasi			Target		% Realisasi 2020 dan target 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Indeks Pembangunan Manusia	80,47	80,76	80,77	81,20	81,60	98,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24	6,54	10,95	4,90	4,80	43,84
Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan)	100	100	100	100	100	100
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,5	90,8	88,2	84	85	103,8
Tingkat Kemiskinan (%)	3,55	3,42	4,69	2,98	2,78	59,28
Jumlah Titik Genangan Banjir	11	5	4	5	0	25
Cakupan pelayanan air bersih (%)	60,33	63,16	64,33	73,69	79,61	80,81
Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	12,4	17,08	20,03	23	26	77,04
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/ <i>Public Transportation Modal Share</i> (%)	15	21,7	8,2	28	30	27,33
Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	114,2	123,9	95	115,9	124,5	76,31
Nilai/Predikat AKIP	BB	BB	BB*	AA	AA	71,43
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,76	84,41	86,34	88	88,5	97,56
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	217	157	147	84	23	15,65

## SASARAN 1

# TERJAMINNYA AKSES DAN LAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENINGKATAN KEBERDAYAAN YANG BERKUALITAS BAGI SEMUA

### Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta telah mencapai 80,77. Angka IPM tahun 2020 tersebut naik tipis sebesar 0,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,76.

“Namun IPM Provinsi DKI Jakarta tetap kokoh di peringkat pertama nasional bahkan satu-satunya provinsi dengan IPM berkategori sangat tinggi”

Adapun indikator yang merupakan Dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

- Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat
- Dimensi Pengetahuan Meningkat
- Dimensi Standar Hidup Layak

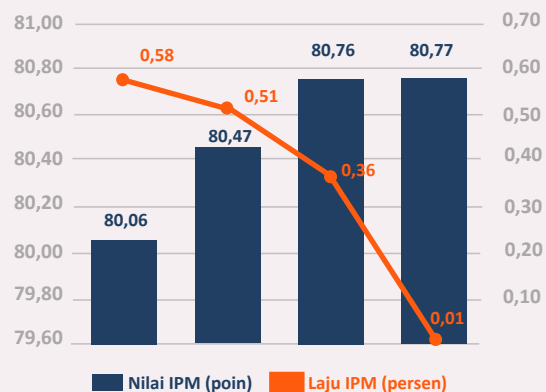
Pada awal tahun 2020 datang pandemi Covid-19 yang sangat berdampak besar terhadap kinerja ekonomi, bahkan kegiatan sosial menyebabkan Dimensi Standar Hidup Layak menurun, dan menjadi penyebab melambatnya laju capaian IPM.

Tahun ini Provinsi DKI Jakarta masih satu-satunya provinsi yang mencapai level IPM “SANGAT TINGGI”, dengan passing grade diatas 80.00. bahkan secara total, angka IPM Provinsi DKI Jakarta berada cukup jauh di atas IPM Indonesia sebesar 71,94



Rank	Provinsi	IPM (%)
1	DKI Jakarta	80,77
2	DI Yogyakarta	79,77
3	Kalimantan Timur	76,24
4	Kepulauan Riau	75,59
5	Bali	75,59
<b>IPM Indonesia</b>		<b>71,94</b>

### NILAI IPM DAN LAJU IPM PROVINSI DKI JAKARTA, 2017-2020



## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DKI JAKARTA MENURUT KOMPONEN, 2010-2020

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	71,71	71,87	72,03	72,19	72,27	72,43	72,49	72,55	72,67	72,79	72,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,86	11,91	11,96	12,24	12,38	12,59	12,73	12,86	12,95	12,97	12,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,37	10,40	10,43	10,47	10,54	10,70	10,88	11,02	11,05	11,06	11,13
Pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP)	Ribu Rupiah	15.111	15.943	16.613	16.828	16.898	17.075	17.468	17.707	18.128	18.527	18.227
IPM		76,31	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77
Pertumbuhan IPM	%		0,87	0,72	0,70	0,40	0,76	0,77	0,58	0,51	0,36	0,01



### Umur Harapan Hidup (UHH)

Penduduk Provinsi DKI Jakarta meningkat dari 71,71 tahun menjadi 72,91 tahun, atau tumbuh sebesar 1,67 persen. Ini menunjukkan derajat kesehatan penduduk Provinsi DKI Jakarta yang semakin membaik.

### Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

juga menunjukkan nilai positif pada tiap tahunnya. Tahun 2020 rata-rata penduduk Provinsi DKI Jakarta pada usia 25 tahun keatas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,13 tahun atau setara dengan masuk kelas XII.



### Harapan Lama Sekolah (HLS)

menunjukkan nilai positif bahwa banyak penduduk Provinsi DKI Jakarta yang melanjutkan sekolah pada level yang lebih tinggi, adapun capaiannya pada tahun 2020 mencapai 12,98 tahun. Dengan capaian tersebut minimal pendidikan anak Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Diploma 1.

### Standar Hidup Layak (PPP)

pada tahun 2020 turun minus 1,62 persen dibandingkan tahun 2019, dimana Pandemi Covid-19 yang masuk pada awal tahun 2019 membuat daya beli masyarakat melemah sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat menurun.



Dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait dengan capaian IPM sebagai berikut:

### DINAS PENDIDIKAN

- Program peningkatan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
- Program wajib belajar 12 tahun
- Program peningkatan mutu pendidikan
- Program pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
- Program Pengembangan sarana dan Prasarana Pendidikan

### DINAS KESEHATAN

- Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan
- Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah
- Program peningkatan prasarana dan sarana bidang kesehatan
- Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDMK)
- Program peningkatan kualitas pelayanan publik urusan kesehatan

### DINAS PPAPP

- Program pemberdayaan masyarakat

### DINAS PORA

- Program pengembangan dan pembinaan olahraga
- Program penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan pramuka

### DINAS PUSIP

- Program pelayanan dan pengembangan perpustakaan

Keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan IPM di tengah pandemi Covid-19 tidak lepas dari upaya konsisten dan kolaboratif yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan seluruh perangkat daerah beserta masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan melaksanakan tatanan kehidupan baru (*new normal*) seperti pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pelayanan kesehatan yang mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 tanpa mengurangi kualitas layanan.

Dalam bidang Pendidikan, misalnya, Dinas Pendidikan meluncurkan portal Siap Belajar (<https://siapbelajarjakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/>) yang bertujuan mengukur kesiapan satuan Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Terintegrasi dengan aplikasi JAKI (Jakarta Kini), portal Siap Belajar juga menyediakan instrumen asesmen Corona Likelihood Metric (CLM) yang dapat digunakan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik untuk melakukan self-assessment apakah sebaiknya melakukan pembelajaran di sekolah atau di rumah. Asesmen ini dapat dilakukan setiap pekan oleh penggunanya. Di dalam portal Siap Belajar juga tersedia beragam panduan pembelajaran jarak jauh yang dapat membantu tenaga pendidik maupun satuan

Pendidikan dalam mempersiapkan PJJ di tengah pandemi. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat secara sistematis terukur keamanannya bagi penyelenggara pelayanan Pendidikan maupun peserta didik dengan tetap berorientasi pada tercapainya Pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu, pada aspek Kesehatan, Dinas Kesehatan secara proaktif melakukan 3T (testing, tracing, treatment) Covid-19. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah tes PCR tertinggi di Indonesia yaitu lebih dari 10 ribu tes per hari dan telah di atas standar yang ditetapkan WHO. Tes yang dilakukan secara masif ini meskipun menjadikan DKI Jakarta salah satu provinsi dengan prevalensi Covid-19 tertinggi di Indonesia, juga memudahkan dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan penyelenggaraan pelayanan publik lainnya. Selain itu, DKI Jakarta juga memperoleh penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 melalui inovasi Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Perempuan dan Anak Bunga Tanjung yang dikembangkan oleh RSUD Tarakan dan Jamu Manis (Ajak Masyarakat untuk Mandiri Hidup Sehat) yang dikembangkan oleh Puskesmas Kecamatan Senen. Inovasi Bunga Tanjung bahkan dipilih oleh Kementerian PANRB sebagai salah satu dari 12 inovasi yang mewakili Indonesia untuk mengikuti United Nations Public Service Award (UNPSA) 2021. Kedua inovasi tersebut menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan kualitas hidup manusia di DKI Jakarta.

**Sebelum Pergi Sekolah Periksa Mandiri Gejala Covid-19 Dulu, Yuk!**  
Untuk memastikan siswa untuk belajar-mengajar di sekolah, lakukan tes Corona Likelihood Metric dulu, ya

Caranya:

- 1 Minta orang tua mendampingi siswa
- 2 Unduh JAKI buka JakCLM
- 3 Isi data diri dan NIK siswa (bisa dilihat di Kartu Keluarga)
- 4 Jawab pertanyaan dengan jujur dan benar
- 5 Di halaman hasil akan ada rekomendasi untuk belajar di sekolah atau dari rumah



## SASARAN 2

### BERKURANGNYA TINGKAT PENGANGGURAN

#### Tingkat Pengangguran

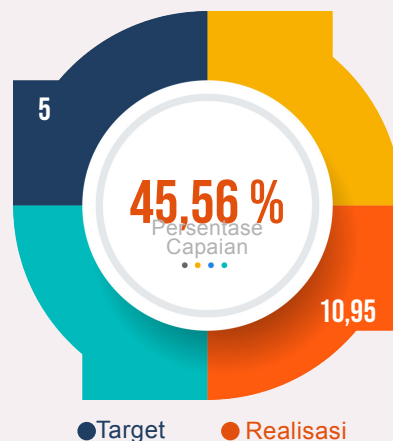
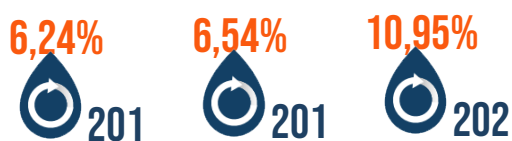
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 pada indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” mengalami peningkatan jumlah pengangguran sebesar 4,41% atau bertambah 233.378 orang, yang mengakibatkan nilai akhir indikator ini mencapai 10,95% berdasarkan data BPS di bulan Agustus.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta, di mana sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan oleh pandemi.

Kenaikan tingkat pengangguran terbuka terjadi pada seluruh jenjang pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran laki-laki naik menjadi 4,54% menjadi 11,06% dan perempuan naik 4,19% menjadi 10,76% pada Agustus 2020.



TPT PERBANDINGAN PER AGUSTUS 2018 S.D. AGUSTUS 2020



#### TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) AGUSTUS 2020

**10,95%** ↑ **94,98** TRILIUN  
Dibandingkan Agustus 2019

#### DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDUDUK USIA KERJA

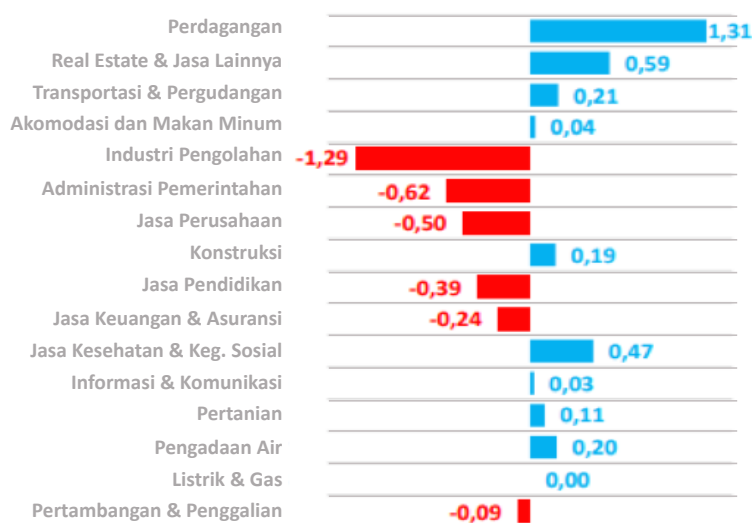
**175.890** ORANG MENJADI PENGANGGURAN  
**77.336** ORANG SEMENTARA TIDAK BEKERJA  
**40.151** ORANG MENJADI INACTIVITY  
**1.573.028** ORANG MENGALAMI PENGURANGAN JAM KERJA

## TABEL KEADAAN ANGKATAN KERJA DKI JAKARTA, AGUSTUS 2019 - AGUSTUS 2020

Status Keadaan Ketenagkerjaan	Agustus 2019			Agustus 2020		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Penduduk Usia Kerja	4.030.342	4.095.782	8.126.124	4.057.218	4.142.476	8.199.694
Angkatan Kerja	3.241.949	1.950.402	5.192.351	3.265.617	1.966.414	5.232.031
Bekerja	3.030.672	1.822.277	4.852.949	2.904.501	1.754.750	4.659.251
Pengangguran	211.277	128.125	339.402	361.116	211.664	572.780
Bukan Angkatan Kerja	788.393	2.145.380	2.933.773	791.601	2.176.062	2.967.663
Pekerja Sektor Formal	2.094.151	1.237.568	3.331.719	1.849.164	1.029.260	2.878.424
Pekerja Sektor Informal	936.521	584.709	1.521.230	1.055.337	725.490	1.780.827
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	80,44	47,62	63,60	80,49	47,47	63,81
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	93,48	93,43	93,46	88,94	89,24	89,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,52	6,57	6,54	11,06	10,76	10,95

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2020

### PERBANDINGAN DISTRIBUSI PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN KERJA, AGUSTUS 2019 - 2020



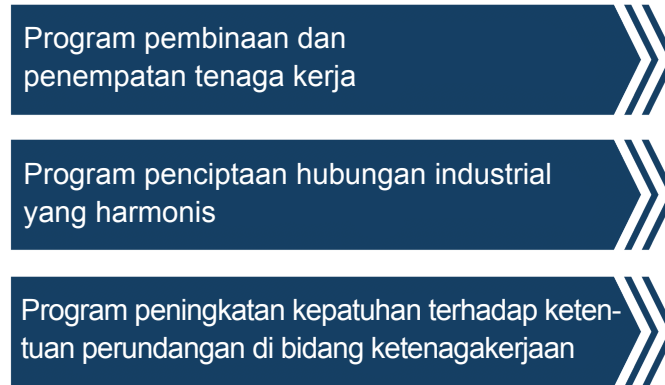
### TANTANGAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2020:

<p>⟩⟩ Pengurangan Jam Kerja yang berakibat pada penurunan produktivitas kerja.</p>	<p>⟩⟩ Masih belum optimalnya tenaga kerja di sektor informal pada masa Pandemi Covid-19</p>
<p>⟩⟩ Masih tingginya pengangguran pada kelompok pendidikan kejuruan.</p>	<p>⟩⟩ Masih banyaknya tambahan setengah pengangguran sukarela</p>

## DATA PERBANDINGAN SELURUH PROVINSI PADA TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, AGUSTUS 2020

Provinsi	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan Ags '18 - Ags '19	Perubahan Ags '19 - Ags '20
Aceh	6,34	6,17	6,59	-0,17	0,42
Sumatera Utara	5,55	5,39	6,91	-0,16	1,52
Sumatera Barat	5,66	5,38	6,88	-0,28	1,50
Riau	5,98	5,76	6,32	-0,22	0,56
Jambi	3,73	4,06	5,13	0,33	1,07
Sumatera Selatan	4,27	4,53	5,51	0,26	0,98
Bengkulu	3,35	3,26	4,07	-0,09	0,81
Lampung	4,04	4,03	4,67	-0,01	0,64
Kep. Bangka Belitung	3,61	3,58	5,25	-0,03	1,67
Kep. Riau	8,04	7,50	10,34	-0,54	2,84
<b>DKI Jakarta</b>	<b>6,65</b>	<b>6,54</b>	<b>10,95</b>	<b>-0,11</b>	<b>4,41</b>
Jawa Barat	8,23	8,04	10,46	-0,19	2,42
Jawa Tengah	4,47	4,44	6,48	-0,03	2,04
D.I Yogyakarta	3,37	3,18	4,57	-0,19	1,39
Jawa Timur	3,91	3,82	5,84	-0,09	2,02
Banten	8,47	8,11	10,64	-0,36	2,53
Bali	1,40	1,57	5,63	0,17	4,06
Nusa Tenggara Barat	3,58	3,28	4,22	-0,30	0,94
Nusa Tenggara Timur	2,85	3,14	4,28	0,29	1,14
Kalimantan Barat	4,18	4,35	5,81	0,17	1,46
Kalimantan Tengah	3,91	4,04	4,58	0,13	0,54
Kalimantan Selatan	4,35	4,18	4,74	-0,17	0,56
Kalimantan Timur	6,41	5,94	6,87	-0,47	0,93
Kalimantan Utara	5,11	4,49	4,97	-0,62	0,48
Sulawesi Utara	6,61	6,01	7,37	-0,60	1,36
Sulawesi Tengah	3,37	3,11	3,77	-0,26	0,66
Sulawesi Selatan	4,94	4,62	6,31	-0,32	1,69
Sulawesi Tenggara	3,19	3,52	4,58	0,33	1,06
Gorontalo	3,70	3,76	4,28	0,06	0,52
Sulawesi Barat	3,01	2,98	3,32	-0,03	0,34
Maluku	6,95	6,69	7,57	-0,026	0,88
Maluku Utara	4,63	4,81	5,15	0,18	0,34
Papua Barat	6,45	6,43	6,80	-0,02	0,37
Papua	3,00	3,51	4,28	0,51	0,77
<b>Total</b>	<b>5,30</b>	<b>5,23</b>	<b>7,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>1,84</b>

## PROGRAM YANG TELAH DILAKSANAKAN



## STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH DALAM MENURUNKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI DKI JAKARTA



## SASARAN 3

# TERSEDINYA STOK KEBUTUHAN PANGAN YANG TERJAMIN JUMLAH DAN MUTUNYA SERTA TERJANGKAU BAGI MASYARAKAT

### Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran strategis “tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat” dicapai melalui 2 (dua) komponen dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yaitu persentase ketersediaan pangan dan skor pola pangan harapan (PPH). Kedua sub-indikator tersebut pada tahun 2020 tercapai sepenuhnya. Pada angka Pola Pangan Harapan, capaiannya bahkan melebihi 100%, tepatnya 106,3%.

Dalam Laporan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020 yang dirilis Kementerian Pertanian RI, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat 10 dengan nilai 77,97. Capaian ini melesat jauh dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019 di mana DKI Jakarta hanya berada pada peringkat ke-21 dari 34 provinsi di Indonesia dengan Indeks Ketahanan Pangan sebesar 66,87. Sedangkan pada tingkat kota, dari 98 kota yang diukur Indeks Ketahanan Pangannya, kota-kota administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperoleh nilai yang cukup baik, antara lain Jakarta Barat (nilai 85,06; peringkat 7), Jakarta Pusat (83,81; 16), Jakarta Selatan (83,62; 17), Jakarta Timur (81,99; 29), dan Jakarta Utara (81,43; 31).

Dalam laporan lain yang juga dirilis Kementerian Pertanian, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan prevalensi malnutrisi terendah di Indonesia pada tahun 2019 dengan nilai 1,45%. Nilai ini juga jauh di bawah nilai prevalensi malnutrisi (*prevalence of undernourishment*) Indonesia per 2019 yaitu 7,66%.

Sebagai kota metropolitan, Jakarta memiliki tingkat konsumsi pangan yang jauh di atas produksi pangan, baik dari hasil pertanian, perikanan, maupun peternakan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan secara aktif melakukan pengawasan untuk memonitor ketahanan pangan di DKI Jakarta. Hasil monitoring tersebut dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat pada laman <https://ketahananpangandki.com>.

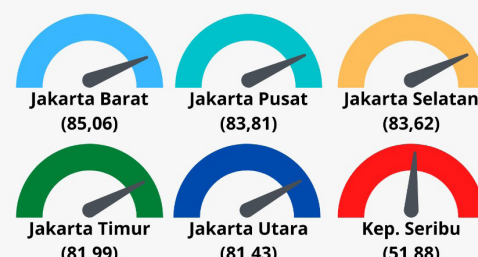
### INDEKS KETAHANAN PANGAN



### TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
PPH	2020	83	88,2	106,3%
	2019	82	90,8	110,7%
Persentase Ketersediaan Pangan	2020	100	100	100%
	2019	100	100	100%

### INDEKS KETAHANAN PANGAN KOTA 2019



## KETERSEDIAAN PANGAN DAN KONSUMSI PENDUDUK DKI JAKARTA TAHUN 2019

Komoditi	Ketersediaan Pangan			Kebutuhan Pangan			Selisih per hari (ton/hr)
	per hari (gr/kap/hr)	per tahun kg/kap/th	per hari (ton/hr)	per hari (gr/kap/hr)	per tahun kg/kap/th	per hari (ton/hr)	
Beras	357.62	130.53	3,782.33	258.20	94.24	2,730.83	1051.51
Ikan	85.67	31.27	906.08	64.70	23.62	684.29	221.79
Daging Sapi	175.58	64.09	1,857.00	17.80	6.50	188.26	1668.74
Daging Ayam	40.43	14.76	427.60	30.40	11.10	321.52	106.08
Telur	30.00	10.95	317.29	24.60	8.98	260.18	57.11
Gula	17.85	6.51	188.78	14.00	5.11	148.07	40.71
Susu	22.62	8.26	239.24	17.8	6.50	188.26	50.98
Sayur	195.91	71.51	2,072.02	143.6	52.41	1,518.77	553.25
Buah	134.81	49.21	1,425.80	104.6	38.18	1,106.29	319.51
Minyak Goreng	95.63	34.90	1147.56	24.6	8.98	260.18	887.38

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman bahan pangannya sendiri melalui *urban farming*. Masyarakat dapat melihat dan belajar dari komunitas *urban farming* dengan mengakses laman [balkotfarm.jakarta.go.id](http://balkotfarm.jakarta.go.id).

Meskipun secara umum indikator kinerja pada sasaran ini telah mencapai hasil yang baik, beberapa Langkah telah disusun untuk diteruskan atau dikembangkan sehingga menjamin keberlanjutan capaian kinerja ini secara persisten. Langkah-langkah tersebut antara lain:

**01** Program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu harus terus dilakukan. Penajaman program perlu dipersiapkan agar jenis konsumsi pangan hewani yang sudah cenderung surplus sejak tahun 2016 dialihkan ke jenis pangan

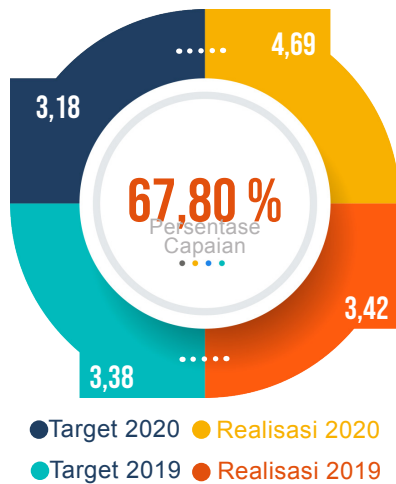
**02** Urban farming yang semakin populer di tengah pandemi Covid-19 harus terus didorong agar berlanjut setelah pandemi berakhir. Untuk itu, dibutuhkan pemberian motivasi dan pendampingan intensif dari penyuluh pertanian dengan pendekatan modern.

**03** Sosialisasi dan promosi program diversifikasi pangan dan konsep pola makan bergizi, seimbang, aman, dan halal (B2SAH) yang dikembangkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan perlu didukung, misalnya dengan mewajibkan menu kudapan B2SAH pada rapat-rapat di lingkungan instansi pemerintah di Jakarta atau memasukkannya ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah dasar dan menengah.

## SASARAN 4

# TERLAKSANANYA PENGENTASAN KEMISKINAN BAGI SELURUH MASYARAKAT

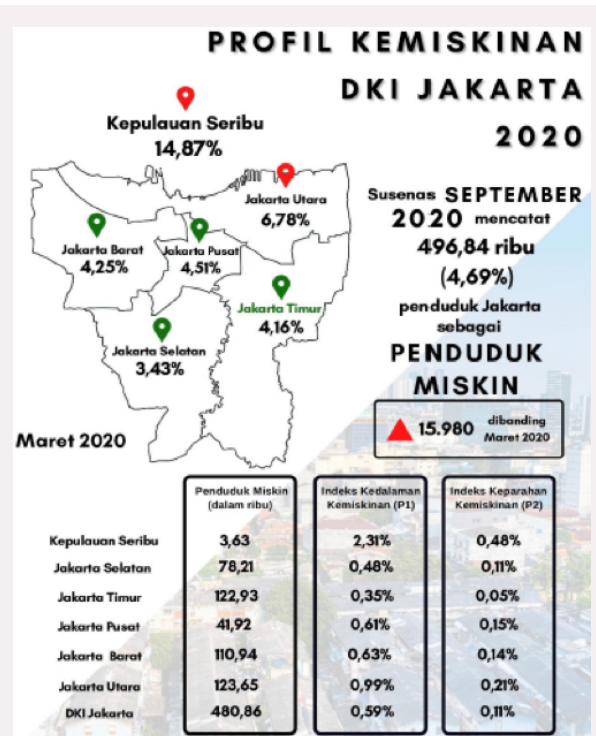
### Tingkat Kemiskinan



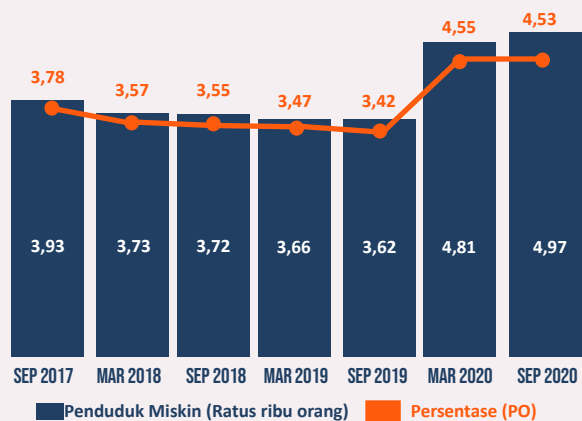
Jumlah Penduduk miskin di Ibukota Jakarta pada September 2020 kembali meningkat menjadi 496,84 ribu orang atau 4,69% dari total penduduk Jakarta. Deflasi pada kelompok bahan makanan sebesar -0.495 persen membantu meringankan beban pengeluaran konsumsi. Di sisi lain, berbagai bantuan sosial yang dikururkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkontribusi menjaga stabilitas konsumsi masyarakat miskin dan hampir miskin.

Secara sosial ekonomi, dampak Covid-19 dapat dirasakan dari penurunan pendapatan masyarakat yang tercermin dari berkurangnya agregat permintaan (demand) konsumsi rumah tangga dalam dua triwulan terakhir. Hal ini memberi tekanan pada kemampuan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan risiko menjadi penduduk miskin.

Kenaikan persentase penduduk miskin Maret-September 2020 masih lebih rendah dibandingkan September 2019. Dampak pandemi Covid-19 melonjakkan penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 1,27% dibanding setahun sebelumnya. Dengan kata lain peningkatan angka kemiskinan pada kurun waktu Maret hingga September 2020 melambat.



### JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DKI JAKARTA TAHUN 2017-2020



**TABEL KEADAAN KEMISKINAN PROVINSI DKI JAKARTA,  
MARET 2019-SEPTEMBER 2019**

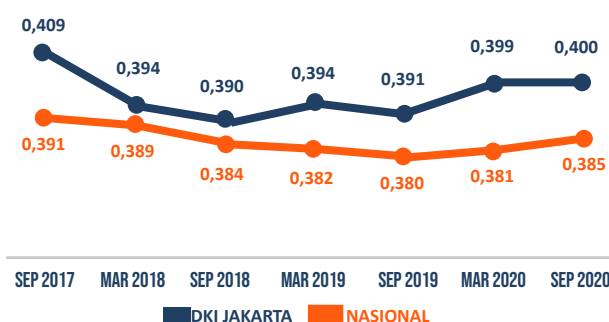
Bulan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
	Makanan	Bukan Makanan	Total				
Maret 2019	429.915 (67,46%)	207.345 (35,54%)	637.26 (100%)	365,55	3,47	0,497	0,111
September 2019	451.918 (68,13%)	211.437 (31,87%)	663.36 (100%)	362,30	3,42	0,397	0,072
Maret 2020	466.156 (68,51%)	214.245 (31,49%)	680.4 (100%)	480,860	4,53	0,590	0,114
September 2020	467,847 (68,46%)	215.491 (31,84%)	683,339 (100%)	496,840	4,69	0,669	0,152

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2020

Adapun metode penghitungan Garis Kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Meningkatnya kemiskinan juga membuat tingkat ketimpangan di DKI Jakarta ikut meningkat. Indeks Gini naik dari 0,399 pada Maret 2020 menjadi 0,400 pada September 2020.

**GINI RATIO DKI JAKARTA DAN NASIONAL, 2017-2020**



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk natura, pemberian intensif untuk UMKM dan pembebasan biaya sewa rusunawa terbukti efektif meredam penurunan daya beli masyarakat, sehingga mampu mengurangi resiko masyarakat menjadi penduduk miskin.

Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial pada Tahun 2020 mempunyai program Penanganan Fakir Miskin yang dimana program tersebut juga didanai APBD sebesar Rp. 49.768.986.798,-.

### 3 PROGRAM BANTUAN DARI PEMERINTAH DKI JAKARTA

#### BANSOS PBB: BANTU KELUARGA YANG MEMBUTUHKAN

Bantuan ini disalurkan selama masa PSBB dengan sumber dana yang berasal dari APBD DKI Jakarta dan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Jumlah Penerima **859.196**  
**KK**

#### PROGRAM KSBB PANGAN: DARI MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT

Bantuan yang diberikan melalui program KSBB Pangan bersumber dari masyarakat untuk diberikan kepada masyarakat

Jumlah Penerima **2.686**  
**RW**

<b>69</b> PANTI ASUHAN	<b>8</b> PANTI JOMPO
<b>6</b> PANTI DISABILITAS	<b>92</b> PESANTREM

#### PROGRAM KSBB UMKM: BANTU PELAKU PENGGERAK EKONOMI IBUKOTA

Ada 3 alternatif paket referensi pada program KSBB UMKM:

- Paket Sarana Prasarana
- Paket Pinjaman Modal
- Paket Pelatihan

Jumlah Pedagang  
**13.602**  
**PEDAGANG**

## JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI MARET 2020 – SEPTEMBER 2020

Provinsi (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)						Persentase Penduduk Miskin (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total		Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Mar'20 (2)	Sep'20 (3)	Mar'20 (4)	Sep'20 (5)	Mar'20 (6)	Sep'20 (7)	Mar'20 (8)	Sep'20 (9)	Mar'20 (10)	Sep'20 (11)	Mar'20 (12)	Sep'20 (13)
1. Aceh	173,90	184,89	641,01	649,02	814,91	833,91	9,84	10,31	17,46	17,96	14,99	15,43
2. Sumut	695,75	756,24	587,54	600,48	1283,29	1356,72	8,73	9,25	8,77	9,02	8,75	9,14
3. Sumbar	128,12	141,31	216,11	223,47	344,23	364,79	4,97	5,22	7,43	7,83	6,28	6,56
4. Riau	175,16	178,46	308,23	312,76	483,39	491,22	6,12	6,39	7,29	7,47	6,82	7,04
5. Jambi	123,64	132,60	154,16	155,50	277,80	288,10	10,41	11,22	6,23	6,40	7,58	7,97
6. Sumsel	387,80	404,43	693,78	715,22	1081,58	1119,65	12,16	12,52	12,96	13,25	12,66	12,98
7. Bengkulu	98,55	99,40	204,03	206,60	302,58	306,00	14,77	15,06	15,16	15,42	15,03	15,30
8. Lampung	237,10	259,28	812,22	831,86	1049,32	1091,14	9,02	9,59	13,83	14,22	12,34	12,76
9. Kep. Babel	25,53	28,38	42,87	43,67	68,39	72,05	3,06	9,59	13,83	14,22	4,53	4,89
10. Kep. Riau	108,86	121,82	23,11	20,79	131,97	142,61	5,42	3,43	6,33	6,75	5,92	6,13
11. DKI Jakarta	480,86	496,84	-	-	480,86	496,84	4,53	4,69	-	-	4,53	4,69
12. Jawa Barat	2725,91	3004,95	1194,33	1183,57	3920,23	4188,52	7,14	7,79	10,27	10,64	7,88	8,43
13. Jawa Tengah	1805,65	1890,49	2175,25	2229,44	3980,90	4119,93	10,09	10,57	12,80	13,20	11,41	11,84
14. D. I. Yogya- karta	326,13	353,21	149,59	149,93	475,72	503,14	11,53	12,17	14,31	14,57	12,28	12,80
15. Jawa Timur	1682,14	1820,13	2736,97	2765,84	4419,10	4585,97	7,89	8,37	14,77	15,16	11,09	11,46
16. Banten	472,84	540,15	303,14	317,49	775,99	857,64	5,03	5,85	8,18	8,57	5,92	6,63
17. Bali	100,38	125,48	64,82	71,44	165,19	196,92	3,33	4,04	4,78	5,40	3,78	4,45
18. NTB	368,43	389,60	345,45	356,44	713,89	746,04	14,90	15,05	13,09	13,42	13,97	14,23
19. NTT	113,39	118,88	1040,37	1054,65	1153,76	1173,53	8,64	8,76	24,73	25,26	20,90	21,21
20. Kalbar	84,36	89,11	282,41	281,61	366,77	370,71	4,69	4,86	8,50	8,57	7,17	7,24
21. Kalteng	51,28	54,34	81,66	87,45	132,94	141,78	4,62	4,92	4,96	5,50	4,82	5,26
22. Kalsel	73,09	78,84	114,78	128,08	187,87	206,92	3,61	3,83	5,08	5,76	4,38	4,83
23. Kaltim	113,27	128,11	116,99	115,88	230,26	243,99	4,45	5,10	9,51	9,98	6,10	6,64
24. Kaltara	23,35	25,16	28,43	27,54	51,79	52,70	5,06	5,74	9,46	10,07	6,80	7,14
25. Sulut	68,80	71,66	123,57	124,19	192,37	195,85	5,22	5,31	10,25	10,64	7,62	7,78
26. Sulteng	80,73	87,43	318,00	316,31	398,73	403,74	8,76	9,21	14,69	14,76	12,92	13,06
27. Sulsel	173,80	195,08	603,03	605,16	776,83	800,24	4,49	4,92	11,97	12,25	8,72	8,99
28. Sultra	76,93	73,22	224,89	244,10	301,82	317,32	7,14	7,62	13,50	13,93	11,00	11,69
29. Gorontalo	20,35	21,55	164,67	163,76	185,02	185,31	3,97	4,18	23,45	24,32	15,22	15,59
30. Sulbar	31,67	28,13	120,34	130,91	152,02	159,05	9,59	9,98	11,26	11,89	10,87	11,50
31. Maluku	49,89	49,87	268,30	272,53	318,18	322,40	6,23	6,36	26,21	27,06	17,44	17,99
32. Maluku Utara	16,58	18,00	69,79	69,52	86,37	87,52	4,53	5,03	7,70	7,74	6,78	6,97
33. Papua Barat	24,09	26,75	184,49	188,47	208,58	215,22	5,85	6,31	32,70	33,20	21,37	21,70
34. Papua	43,63	44,73	867,74	867,50	911,37	912,23	4,47	4,59	35,50	35,69	26,64	26,80
Indonesia	11161,96	12,038,50	15262,06	15511,19	26424,02	27549,69	7,38	7,88	12,82	13,20	9,78	10,19

Dikutip dari Berita Resmi Statistik BPS No 16/02/31/Th.XXIV, 15 Februari 2021

Penghitungan kemiskinan September 2020 dilakukan dengan menggunakan sebagai isian Susenas September 2020 dan sebagian isian Susenas Maret 2020. Disamping itu, nilai kuantitas yang digunakan adalah kuantitas dari Susenas Maret 2020 (*fixed quantity*).

## SASARAN 5

### MENINGKATNYA FUNGSI DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DAN ABRASI

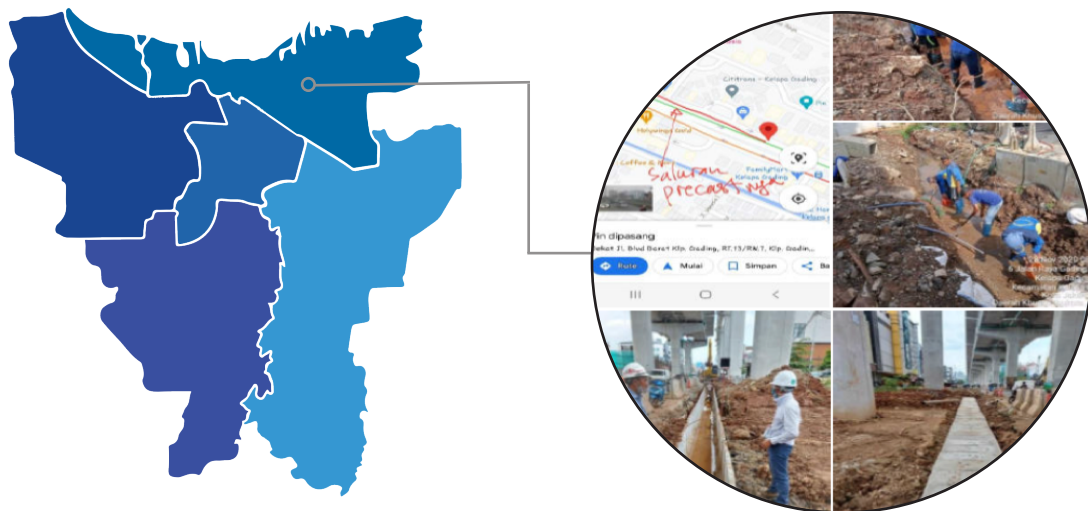
#### Jumlah Titik Genangan Banjir

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 untuk mencapai capaian sasaran meningkatnya fungsi dan pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi melakukan pengurangan titik genangan pada 15 titik jalan yang dilaporkan sering terjadi genangan yang bukan berasal dari luapan kali/sungai.

Indikator keberhasilan penurunan titik genangan banjir tiap tahunnya menggunakan *formulasi minimize*. Jika titik genangan banjir tiap tahunnya menurun, dapat dikatakan capaian kinerjanya semakin baik. Pada tahun 2020 terdapat 6 titik dengan realisasi sebesar 4 titik dengan capaian 122,22%.



#### PENANGANAN GENANGAN TAHUN 2020 PADA LOKASI JL. BOULEVARD BARAT, JAKARTA UTARA



No	Target RPJMD 2017-2022	Rincian Target					Rincian Realisasi					Sisa Genangan Yang Belum Tertangani
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Perempatan ITC Fatmawati											1.Jl. DI Panjaitan
2	Komplek Paspampres Kramat Jati											2.Jl. Mangga Dua Raya
3	Jl. Taman Mini 1 (Simpang)											3.Jl. Petogogan
4	Jl. DI Panjaitan											4.Jl. Mayjend Sutoyo depan UKI
5	Jl. Patra Raya											
6	Jl. Letjend S. Parman											
7	Jl. Industri/Industri 1											
8	Jl. Mangga Dua Raya											
9	Jl. Boulevard Barat											
10	Jl. Pahlawan Kalibata Depan											
11	Jl. Petogogan											
12	Jl. Mayjend Sutoyo depan UKI											
13	Jl. Balai Pustaka											
14	Jl. Arjuna Selatan											
15	Jl. Plumpang Semper											

Keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 dalam melakukan pengurangan jumlah genangan titik banjir didukung oleh Program Pengendali Banjir dan Abrasi yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air. Dalam program tersebut, antara lain, dilakukan penanganan genangan pada lokasi Jalan Boulevard Barat, Jakarta Utara yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan saluran *precast* yang menghubungkan titik/lokasi yang sering dilaporkan terjadinya genangan sampai pada Saluran Penghubung (PHB) BGR sepanjang 230 meter dengan bekerja sama antar pasukan Biru Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan pihak kontraktor jalan tol Kelapa Gading-Pulogebang.

Dalam penanganan banjir, Gubernur DKI Jakarta juga secara tegas memberikan instruksi bahwa banjir harus dapat dituntaskan dalam waktu kurang dari 6 (enam) jam. Untuk itu, apabila terdapat genangan, maka seluruh unsur terkait termasuk relawan dari kelompok masyarakat akan bahu-membahu untuk memastikan banjir segera surut. Kerja kolaboratif dengan sasaran yang jelas ini menjadi sangat penting mengingat Jakarta masih menjadi bagian dari wilayah terdampak pandemi Covid-19. Apabila banjir dibiarkan berlarut-larut, maka dapat mengakibatkan penderitaan penduduk menjadi semakin berat.

Tahun	Jumlah Titik Genangan Banjir (RPJMD 2017-2022)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	12	7	6	5	0
Realisasi	11	6	4	n/a	n/a
Capaian(%)	133.33	112.50	122.22	n/a	n/a



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengurangi titik genangan banjir setiap tahunnya. Apabila tren positif ini berhasil dipertahankan, maka target strategis yang disusun hingga tahun 2022 diproyeksikan dapat terwujud sesuai rencana

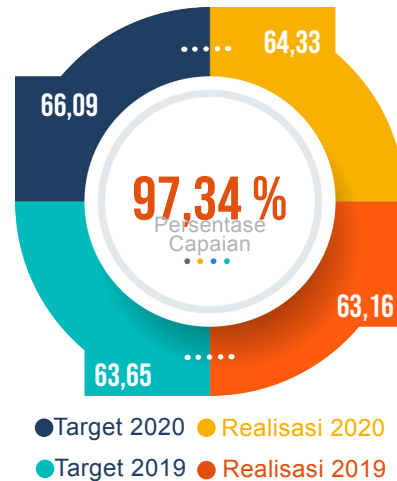
## SASARAN 6

### MENINGKATNYA AKSES SANITASI LAYAK

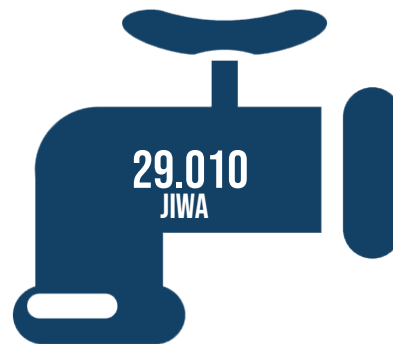
#### Cakupan Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, pada indikator “persentase cakupan pelayanan air bersih” di tahun 2020 mempunyai target sebesar 66,09%. Adapun realisasi sebesar 64,33% sehingga dengan hasil tersebut maka capaian pada tahun ini sebesar 97,34%. Capaian ini tergolong sangat tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air melaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) pada 2 lokasi yaitu IPA Waduk Tomang Barat dan IPA Pompa Ancol, namun pembangunannya tertunda akibat kendala pencairan anggaran dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

Dalam pelaksanaan pelayanan air bersih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlayani oleh jaringan PD PAM Jaya dan IPA RO Dinas Sumber Daya Air.



#### IPA RO DINAS SUMBER DAYA AIR



**PDAM JAYA**  
6.823.934  
JIWA



**PULAU PAYUNG** | 47 SAMBUNGAN  
235 PENDUDUK TERLAYANI

**PULAU PANGGANG** | 1167 SAMBUNGAN  
5835 PENDUDUK TERLAYANI

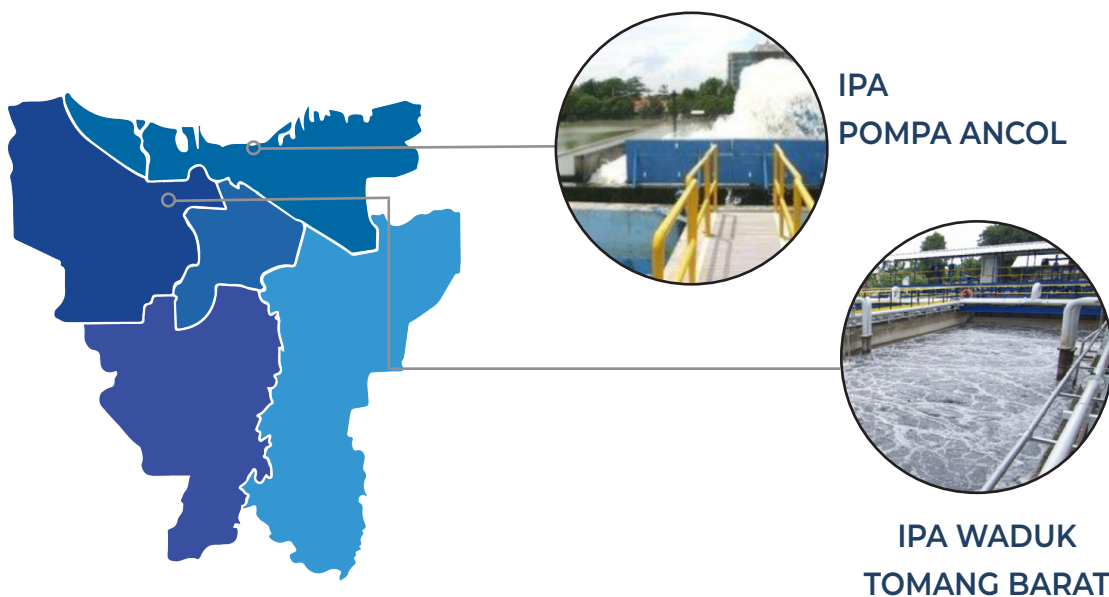
**PULAU KELAPA DUA** | 110 SAMBUNGAN  
550 PENDUDUK TERLAYANI

**PULAU PRAMUKA** | 659 SAMBUNGAN  
3295 PENDUDUK TERLAYANI

**PULAU KELAPA HARAPAN** | 1961 SAMBUNGAN  
9805 PENDUDUK TERLAYANI

**PULAU TIDUNG** | 1258 SAMBUNGAN  
6290 PENDUDUK TERLAYANI

**PULAU LANCANG** | 600 SAMBUNGAN  
3000 PENDUDUK TERLAYANI



PD PAM Jaya pada tahun 2020 telah melayani air bersih pada lokasi Kepulauan Seribu sebanyak 5.700 penduduk.

Dan penduduk yang terlayani air bersih oleh IPA RO ada sebanyak 917 penduduk.

Berdasarkan uraian diatas bahwa total penduduk yang terlayani air bersih sebesar  $6.823.934 + (29.010 - 5700 + 917) = 6.848.161$  jiwa penduduk. Dengan data BPS penduduk 2010 yakni sebesar 10.645.000 jiwa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dalam mencapai target capaian tersebut telah melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih. Adapun program tersebut didanai dengan APBD Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu:

**01** Keterlambatan pencairan termin 1 (PEN tahap 2) dan akan dilanjutkan pada tahun 2021, sehingga pada akhir tahun 2020 belum tersambung layanan air bersih pada IPA Waduk Tomang Barat dan IPA Ancol.

**02** Refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19, sehingga capaian yang dapat dilaporkan adalah berdasarkan data capaian PD. PDAM Jaya Tahun 2020.

Adapun solusi terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan ketersediaan anggaran pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tahun 2021.

Peningkatan akses penduduk ke air bersih merupakan salah satu dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu SDG ke-6. Kinerja Indonesia pada SDG ke-6 ini di tahun 2020 melesat dengan cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dari kontribusi kinerja penyediaan air bersih di daerah-daerah termasuk DKI Jakarta. Menurut Firdaus Ali, pendiri dan pimpinan Indonesia Water Institute, hanya 21,08 persen penduduk Indonesia yang telah terlayani air perpipaan (2021). Dengan demikian, capaian 64,33 persen yang diraih Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2020 merupakan prestasi yang cukup baik. Kinerja yang baik ini tidak lepas dari kerja kolaboratif antara Dinas Sumber Daya Air dan PD PAM Jaya.

## Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

Pada Indikator mengenai “Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota” memiliki target tahun 2020 sebesar 20% dan capaiannya sebesar 20,03% dari target, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian dari Indikator tersebut sebesar 100,15% dengan kategori capaian Sangat Tinggi.

Pada tahun 2019 Indikator tersebut memiliki target sebesar 17% dan terealisasi sebesar 17,08% dengan capaian 100,47%.

Indikator Penurunan Volume Sampah ini ditentukan dari :



$$\frac{\text{jumlah timbulan sampah} - \text{jumlah sampah di TPST}^*)}{\text{Timbulan sampah}} \times 100\%$$

Uraian	Jumlah
Estimasi timbulan sampah tahun 2020 a	3.063.185,18 ton/tahun
Sampah diangkut ke TPST Bantargebang Tahun 2020 b	2.449.702,09 ton/tahun
Total Pengurangan sampah Tahun 2020 (c = a – b)	613.483,09 ton/tahun
% pengurangan sampah ta-hun 2020 (c/a*100%)	20,03%

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Peraturan ini resmi berlaku pada 1 Juli 2020 dengan ketentuan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada transaksi di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berujung pada teguran hingga uang paksa dan pencabutan izin usaha.

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembangunan *intermediate treatment facility* (ITF) di beberapa titik sebagai solusi pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan mengingat TPST Bantargebang diproyeksikan tidak mampu menampung sampah lagi pada 2021.



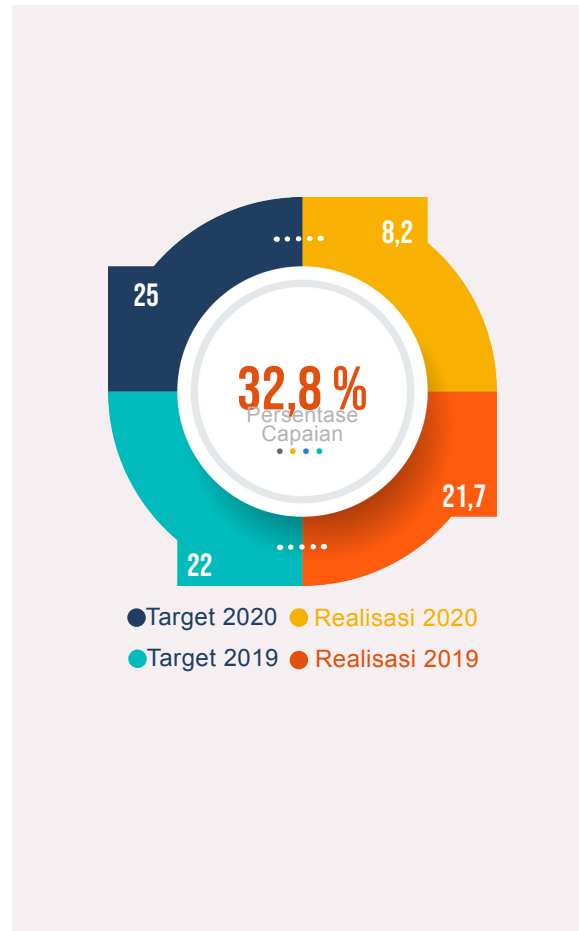
## SASARAN 7

### TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG AMAN, MEMADAI, MODERN, TERINTEGRASI, RAMAH LINGKUNGAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA WARGA

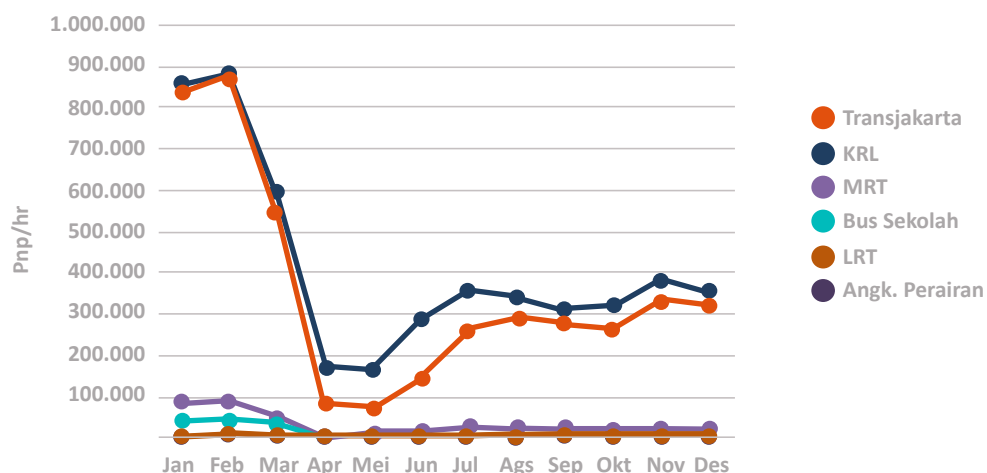
#### Persentase perjalanan penduduk menggunakan kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)

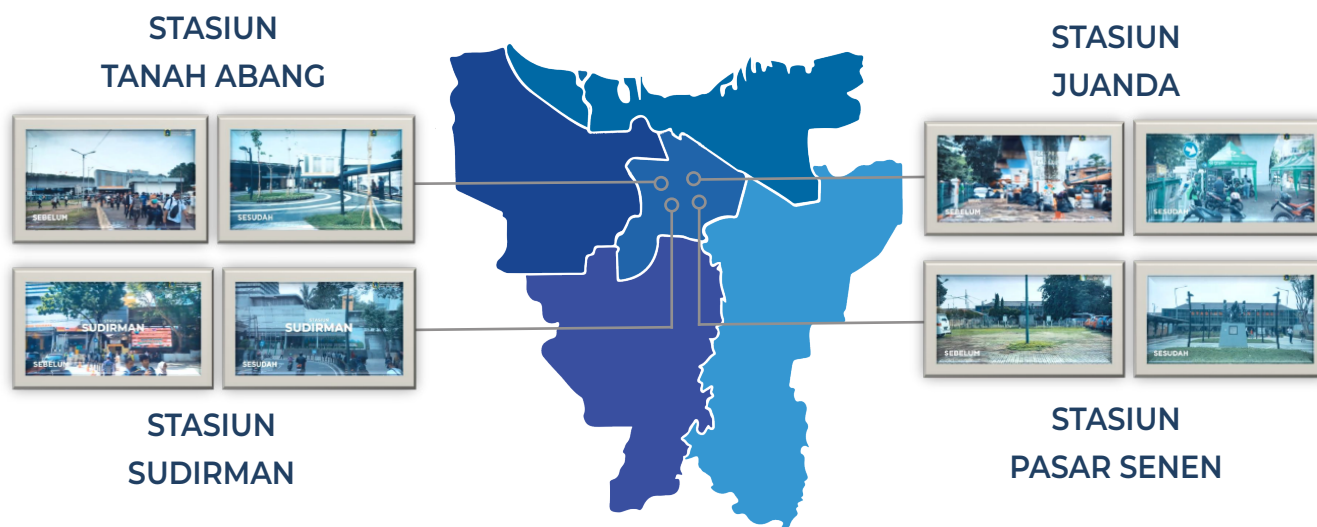
Perjalanan masyarakat untuk menuju suatu tempat tujuan dibagi menjadi dua moda, yaitu dengan menggunakan angkutan umum dan menggunakan kendaraan pribadi. Persentase perjalanan penduduk menggunakan kendaraan bermotor umum (public transportation modal share) diperoleh dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Pada Tahun 2020, aktualisasi perjalanan menggunakan angkutan umum mencapai 8,2% dari total perjalanan di wilayah DKI Jakarta sebesar 15.901.091 perjalanan per hari. Capaian tersebut turun dari tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 21,7%.

Tidak tercapainya indikator kinerja ini salah satunya disebabkan oleh adanya pembatasan jumlah penumpang dan waktu operasional angkutan umum selama masa PSBB dan kemudian PPKM Covid-19. Kebijakan ini ditempuh guna mencegah penyebaran virus corona di angkutan umum. Akibatnya, sebagian penumpang angkutan umum cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk alasan kesehatan.



#### JUMLAH PENUMPANG/HARI





Penurunan persentase perjalanan menggunakan angkutan umum selama pandemi tidak berarti menurunnya usaha peningkatan layanan angkutan umum. Selama Tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan selaku Leading Sector melakukan kolaborasi dengan SKPD, BUMD, dan BUMN dalam menata dan mengintegrasikan Kawasan Stasiun.

Stasiun yang dilakukan penataan pada tahap 1 di Tahun 2020 antara lain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, dan Stasiun Pasar Senen. Integrasi dilakukan dengan menghubungkan antar moda (KRL dengan Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya) yang lebih efektif serta untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di sekitar stasiun. Dengan penataan ini, diharapkan saat pandemi mereda dan aktivitas masyarakat kembali normal, mereka akan memilih untuk mobilitas menggunakan angkutan umum.

Terkait pengembangan kualitas dan integrasi Transjakarta dengan moda lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Sustainable Transport Award (STA) 2021 berdasarkan penilaian dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) atas program

integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. Kota pemenang STA ini diumumkan pada konferensi transport internasional Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada 26, 28 dan 30 Oktober 2020. Jakarta meraih penghargaan setelah sebelumnya juga meraih honorable mention atas keberhasilan dalam menaikkan jumlah penumpang hingga 200%.



## SASARAN 8

### MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI

#### Realisasi Nilai Investasi

Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,1% begitu pula pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp 123,9 triliun menjadi Rp 95 triliun atau penurunan sebesar 23,3%.

Kondisi perekonomian nasional yang melambat seiring dengan pandemi Covid-19 mengakibatkan lesunya investasi dan tendensi masyarakat dan pengusaha untuk meningkatkan tabungan (*savings*). Namun demikian, data BPS menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri tertinggi ke-3 di Indonesia dengan nilai Rp 42,9 triliun, di bawah Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dalam hal penanaman modal asing (PMA), BKPM mencatat tren positif PMA di Provinsi DKI Jakarta yang cenderung stabil di sepanjang tahun 2020 mulai dari triwulan I (US\$ 915,2 juta), sempat menurun pada triwulan II (US\$ 847,1 juta) di masa awal pandemi Covid-19, namun terus meningkat pada triwulan III (US\$ 933,2 juta) dan triwulan IV (US\$ 917,7 juta).

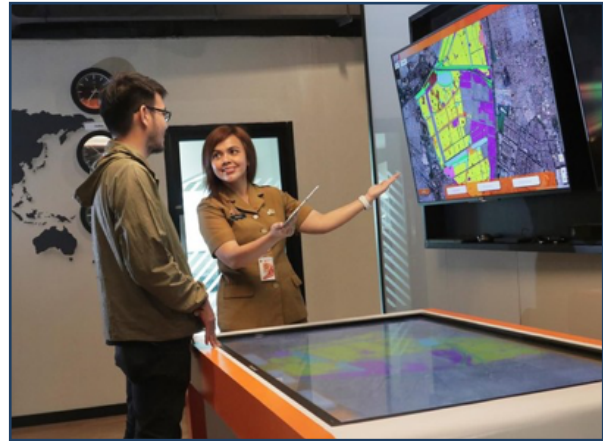
Keberhasilan menjaga nilai investasi tidak terlalu jatuh di masa pandemi Covid-19 didukung oleh faktor-faktor, antara lain:

- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara *online*
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan
- Perbaikan dalam kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) yang mempengaruhi investor



#### REALISASI NILAI INVESTASI





dalam menginvestasikan dananya di Jakarta dengan meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

- Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
- Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.

- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

Sejumlah tantangan masih mengiringi upaya peningkatan realisasi investasi di DKI Jakarta, termasuk belum berakhirnya pandemi Covid-19, harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang belum tercapai, belum cukup tingginya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha terkait kebijakan Ease of Doing Business yang telah dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPMPSTSP akan melakukan sejumlah upaya tindak lanjut, antara lain:

## UPAYA TINDAK LANJUT

**1**

Melakukan pengkajian dan penelaahan atas kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan;

**2**

Menyederhanakan regulasi investasi dan/atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah;

**3**

Meningkatkan aktivitas promosi melalui branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI Jakarta) dan business forum;

**4**

Mengoptimalkan fungsi JIC sebagai wahana masyarakat dan dunia usaha memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

## SASARAN 9

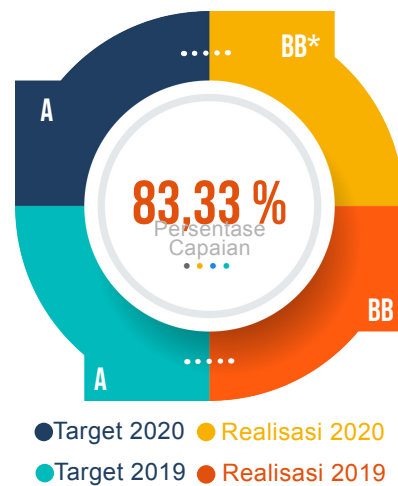
# TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

### Nilai / Predikat AKIP

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh predikat BB. Meskipun belum dapat mencapai target predikat A sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan perjanjian kinerja Gubernur, namun nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018, nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 71,04 sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 73,84

Pada level perangkat daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi internal atas SAKIP di setiap OPD. Hasilnya adalah nilai rata-rata AKIP OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 86,77 dengan predikat A (memuaskan). Terdapat 6 (enam) OPD yang bahkan memperoleh predikat AA, yaitu Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

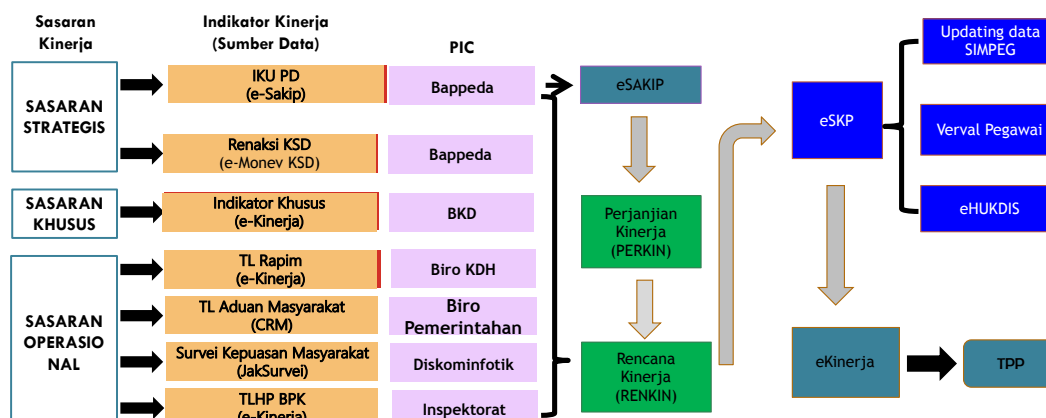


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup. Penilaian ini menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada *outcomes* telah menunjukkan hasil yang sangat baik.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan
1	Menyempurnakan indikator tujuan pada Renstra OPD sehingga dapat digunakan dan cukup untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah	Inspektorat telah memberikan rekomendasi penyempurnaan indikator tujuan pada Renstra OPD. Selain itu, RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diperkuat dengan indikator tujuan yang lebih terukur.
2	Meningkatkan kualitas <i>cascading</i> kinerja sehingga menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan, dan menjabarkan kinerja ( <i>cascading</i> ) setiap OPD sampai dengan kinerja level individu sehingga terjadi keselarasan antara ukuran kinerja organisasi dengan ukuran kinerja individu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan pohon kinerja</li> <li>Pergub 18/2020 tentang Penilaian Kinerja dan Pergub 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dalam rangka mewujudkan <i>performance-based salary</i></li> </ul>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan
4	Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Provinsi maupun OPD khususnya dalam hal penyajian analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan penyajian informasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.	Inspektorat telah memberikan rekomendasi peningkatan kualitas Laporan Kinerja baik untuk tingkat Provinsi maupun OPD, sehingga laporan kinerja telah memuat analisis atas kinerja secara memadai.
5	Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Provinsi sehingga mampu memberikan rekomendasi yang dapat mendorong penguatan dalam Implementasi SAKIP di tingkat OPD secara signifikan	Evaluasi atas SAKIP OPD dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dengan pendekatan <i>assist</i> dan <i>assess</i> , di mana predikat AKIP menjadi salah satu kegiatan strategis bagi setiap OPD dan rekomendasi Inspektorat menjadi rencana aksi yang harus diselesaikan OPD.
6	Melakukan usulan program yang berfokus pada hasil dan melakukan pengkajian dengan mereviu sasaran program, kegiatan dan komponen anggaran pada seluruh OPD dengan mengacu pada pencapaian IKU OPD untuk memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis organisasi	Refocusing program berbasis kinerja belum dapat dilakukan secara optimal karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat <i>refocusing program</i> dan anggaran diarahkan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. SE Sekda Nomor 13/2020, Perangkat Daerah Menyusun Ranwal Renja dengan berpedoman pada Renstra dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.

## KETERKAITAN SISTEM INFORMASI DALAM KERANGKA MANAJEMEN KINERJA



Salah satu tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi Kementerian PANRB dalam rangka penguatan SAKIP Provinsi DKI Jakarta adalah penyempurnaan dan integrasi sistem-sistem informasi yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, sistem-sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saling mendukung dalam kerangka manajemen kinerja. Pada perencanaan strategis, aplikasi e-SAKIP mawadahi untuk penyusunan IKU perangkat daerah, sedangkan rencana aksi kinerja dikelola dalam e-Monev. Aplikasi e-Kinerja digunakan untuk penerjemahan pada sasaran yang bersifat khusus termasuk tindak lanjut arahan Gubernur dalam rapat pimpinan. Aplikasi ini juga digunakan sebagai

monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengguna layanan menjadikan hasil survey kepuasan masyarakat dan aduan masyarakat sebagai bagian dari dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua hal ini dikelola dalam aplikasi CRM dan JakSurvei.

Selanjutnya, manajemen kinerja yang telah terjabarkan pada level organisasi dan unit kerja dijabarkan lebih lanjut pada level individu pegawai. Ini dilakukan dengan bantuan aplikasi eSKP yang terintegrasi dengan eKinerja sebagai dasar dalam pemberian TPP pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diukur secara agregat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Selama kurun waktu 2018 hingga 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan, dari 83,76 pada tahun 2018, meningkat menjadi 84,41 pada tahun 2019 dan 86,34 pada tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam kategori Baik. Ini menunjukkan hasil dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kualitas pelayanan publik dan kepuasan pengguna layanan.

Meskipun secara nilai terus meningkat, hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah belum optimalnya pemberian reward and punishment sebagai tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), di mana di dalamnya diatur bahwa TPP diberikan berdasarkan capaian penilaian kinerja, di mana capaian penilaian kinerja bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas terdiri atas:

- a) Hasil pengukuran kinerja triwulan;
- b) Aktivitas kerja; dan
- c) Tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Artinya, aspirasi masyarakat menjadi penentu besaran TPP yang diterima oleh pimpinan unit kerja.



### CAPAIAN PENILAIAN KINERJA BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

- Hasil pengukuran kinerja triwulan
- Aktivitas Kerja
- Tindak lanjut pengaduan masyarakat

## Opini Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan agar dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai sehingga laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

Sesuai ketentuan, hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan ke BPK. Sehingga, dalam LKj ini, capaian yang dilaporkan adalah capaian atas tahun 2019 sesuai hasil audit BPK yang tertuang dalam Laporan Nomor 11.A/LHP/XVIII. JKT-XVIII.JKT.2/06/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Opini BPK atas LKPD Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 secara konsisten ada pada predikat WTP. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik.

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Aksi dalam rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian, telah dilakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan laporan keuangan



oleh Inspektorat kepada seluruh OPD/unit OPD terutama yang mengalami reorganisasi. Selain itu dilakukan pula reuiu atas LKPD oleh Inspektorat dan BPK RI perwakilan DKI Jakarta. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta juga melakukan monitoring serta mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian atas percepatan rencana aksi, dan memfasilitasi penyusunan rencana aksi mempertahankan predikat WTP, baik terkait manajemen aset, pendapatan dan piutang pajak dan retribusi daerah, dan penyusunan neraca penutup tahun.

## SASARAN 10

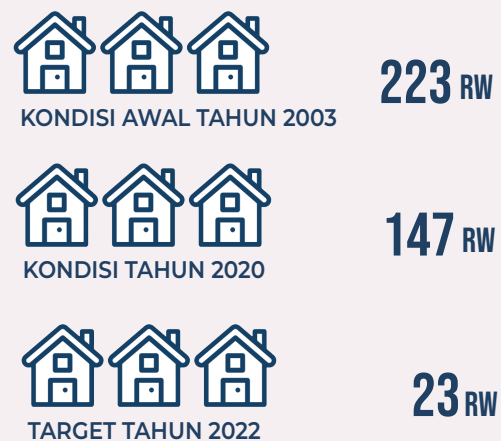
### TERWUJUDNYA KAWASAN PERKOTAAN YANG LAYAK HUNI, TERTATA RAPI DAN BERKELANJUTAN BERIKUT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA

#### Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Jumlah Kawasan kumuh di DKI Jakarta ditargetkan turun hingga tersisa 23 RW saja pada tahun 2022. Data ini berdasarkan baseline yang ditetapkan dari data BPS tahun 2013 yaitu sebanyak 223 RW kumuh. Pada tahun 2020, ditargetkan jumlah RW kumuh tersisa 147 saja. Target ini berhasil dicapai di tengah segala keterbatasan dan tantangan yang mengiringi terutama dengan adanya pandemi Covid-19.

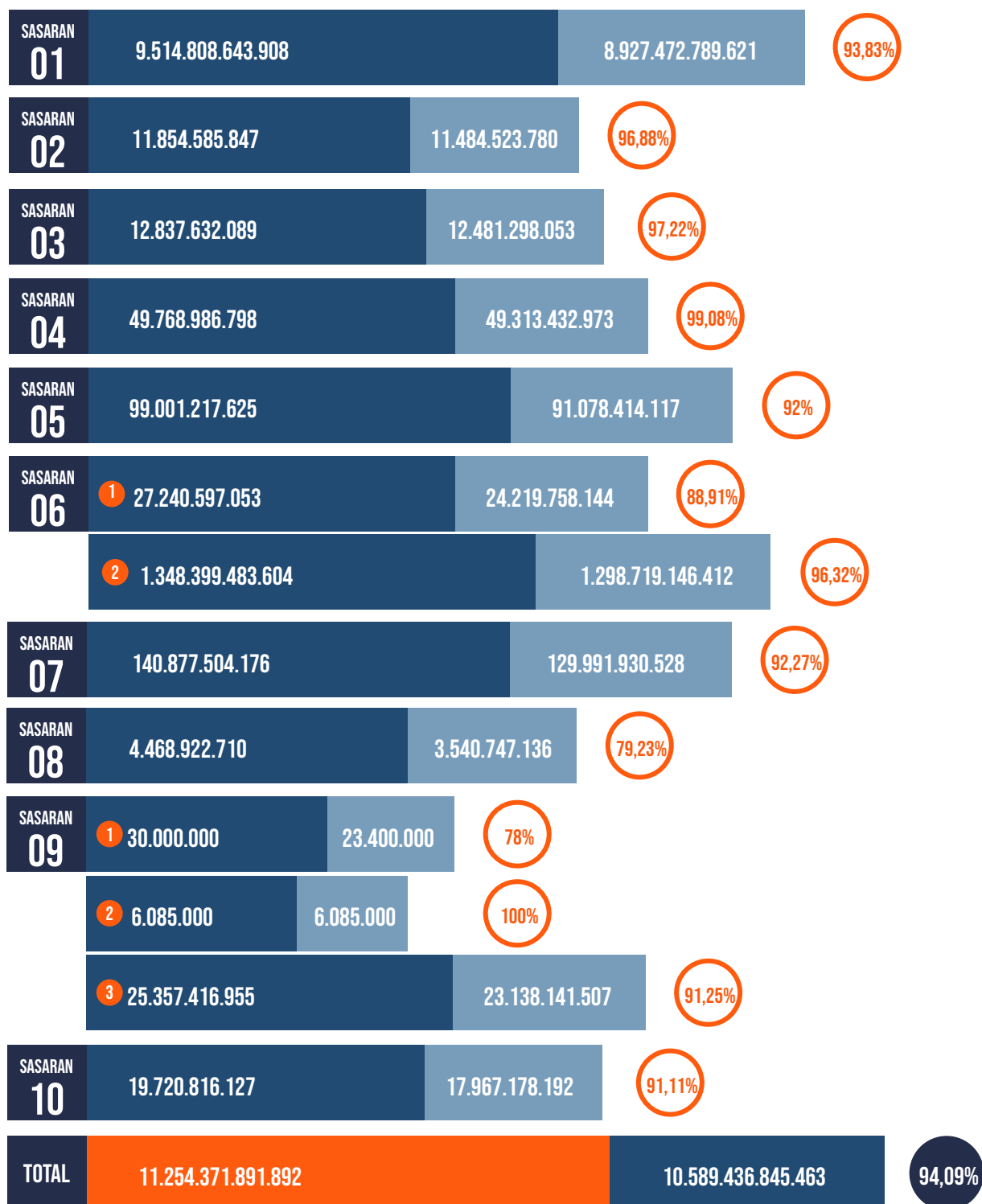
Meskipun secara *outcomes* jangka menengah indikator ini berhasil dicapai, pada dasarnya output penataan RW pada tahun 2020 belum berjalan sesuai rencana. Dari total 56 RW yang ditargetkan akan ditata, hanya terealisasi penataan di 11 RW. Hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Penataan dilakukan secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta, meliputi Jakarta Pusat (Karet Tengsin, Menteng), Jakarta Utara (Cilincing, Kamal), Jakarta Barat (Duri Kepa, Keagungan), Jakarta Selatan (Gandaria), Jakarta Timur (Cipinang Besar Selatan, Rawamangun, Rawa Bunga). Adapun penataan di wilayah Kepulauan Seribu (Pulau Panggang) terpaksa ditunda untuk tahun anggaran 2021 karena waktu pekerjaan yang singkat dan faktor cuaca yang kurang mendukung



# REALISASI ANGGARAN

Pada aspek anggaran, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai 10 sasaran strategis pada tahun 2020 telah cukup baik, sebagaimana terlihat pada infografis berikut.



Dari infografis di atas, diketahui bahwa dari total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan 10 sasaran strategis yaitu sebanyak Rp 11,25 triliun, telah direalisasikan sebesar Rp 10,59 triliun atau sebesar 94,09%. Realisasi ini dikatakan cukup baik mengingat perubahan yang signifikan terjadi pada tahun anggaran 2020 di mana Sebagian besar kegiatan harus dialihkan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, sedangkan anggaran yang tersisa untuk program-program lain termasuk yang menjadi pendukung sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2020 dilaksanakan dengan pendekatan cara kerja baru (*new way of working*) berbasis digital.

Di tengah perubahan besar tersebut, persentase realisasi anggaran dalam mewujudkan sasaran strategis yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2020 justru lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran serupa pada tahun 2019. Pada tahun lalu, persentase realisasi anggaran terkait Perjanjian Kinerja Gubernur adalah sebesar 78,84%.



# EFISIENSI ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut.

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Indeks Pembangunan Manusia	0,9996	9.514.808.643.908	8.927.472.789.621
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,4566	11.854.585.847	11.484.523.780
Indeks Ketahanan Pangan (% ketersediaan pangan dan skor pola pangan harapan)	1,03	12.837.632.089	12.481.298.053
Tingkat Kemiskinan (%)	0,678	49.768.986.798	49.313.432.973
Jumlah Titik Genangan Banjir	1,75	99.001.217.625	91.078.414.117
Cakupan pelayanan air bersih (%)	0,9734	27.240.597.053	24.219.758.144
Persentase penurunan volume sampah di kota (%)	1,001	1.348.399.483.604	1.298.719.146.412
Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum/Public Transportation Modal Share (%)	0,328	140.877.504.176	129.991.930.528
Realisasi Nilai Investasi (Rp triliun)	0,881	4.468.922.710	3.540.747.136
Nilai/Predikat AKIP	0,8333	30.000.000	23.400.000
Indeks Kepuasan Masyarakat	1,004	6.085.000	6.085.000
Opini Laporan Keuangan	1	25.357.416.955	23.138.141.507
Jumlah kawasan permukiman RW Kumuh	1	19.720.816.127	17.967.178.192

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 5,52%. Lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu  $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$ , maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 63%. Artinya, secara umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).

# PENGHARGAAN

01

Honorable Mention Sustainable Transportation Award, diberikan oleh Institute for Transportation and Development Policy

02

Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan di DKI Jakarta, diberikan oleh Menteri Agama RI.

03

TOP Corporate Performance 2020, TOP CEO in Digital Transformation-Chief Executive Officer 2020, dan TOP CIO in Digital Business Process-Chief Information Technology 2020, diberikan kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) oleh TOP Digital Innovation Award.

04

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan, diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

05

Penghargaan Program Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Program P4GN) atas Kontribusi Pencegahan dan Penanganan Narkotika, diberikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) RI.

06

Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik dan Top of The Top BUMD Award 2020, diberikan oleh Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah (i-Otda) dan Lembaga Kajian Nawacita (LKN)

07

Anugerah Inovasi Indonesia (ICAI) 2020 untuk kategori proses internal atas inovasi teknologi digital Building Information Modelling (BIM), diberikan kepada Jakarta Propertindo, diberikan oleh IDX Channel.

08

Public Relations Indonesia Awards 2020, diberikan oleh Public Relations Indonesia, meliputi:

- a. Platinum Awards (Juara Umum) PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi
- b. PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media
- c. Best Presenter PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi, diberikan kepada Rinaldi, S.I.Kom., M.Si., Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- d. Departemen PR - Kinerja Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DP-MPTSP Provinsi DKI Jakarta
- e. Media Sosial DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta - @layananjakarta
- f. Video Profil DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang berjudul Jakarta Investment Centre
- g. Pra Krisis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- h. Program Government PR - DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Urus Izin Sendiri itu Mudah
- i. Program Digital PR - DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Mini Seri di-AJIBin Aja





Juara Pertama Kompetisi Nasional dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diberikan atas aplikasi Jakarta Kini (JAKI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI.

09

Padma Mitra Award, diberikan oleh Kementerian Sosial atas penanganan Covid-19 tahun 2020.

10

Indonesia Government Procurement Award 2020 dalam kategori inovasi pengadaan yang mendukung Transparansi Belanja Pengadaan, diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

11

Juara kedua lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke XXVII di tahun 2020.

12

Pemda Berkualifikasi Informatif, diberikan oleh Komisi Informasi Pusat

13

Bhumandala Award, diberikan oleh Badan Informasi Geospasial RI.

14

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 untuk Inovasi Layanan Bunga Tanjung (Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan pada Perempuan dan Anak), diberikan oleh Kementerian PANRB.

15

Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020 dengan 2 kategori, yaitu Gubernur Terpopuler di Media Digital 2020 dan Pemprov Terpopuler di Media Digital 2020.

16

Best Use of Images Pemerintah Provinsi dalam Government Social Media Summit 2020.

17

Penghargaan Platinum dan Gold Transportasi Ramah Disabilitas dalam Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Award 2020, diberikan kepada PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta.

18

Rekor Dunia MURI atas Tes HIV secara Serentak di Provinsi Terbanyak.

19

20

Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2020, diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

21

Penghargaan atas Upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan Hak, Bidang Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Dunia Usaha atau Dunia Industri Inklusif.

22

Provinsi Terinovatif dalam penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020, diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri RI

23

Pelopor Keselamatan dalam Mengimplementasikan Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia.

24

Top Leader on Digital Implementation 2020, diberikan kepada Gubernur Anies Baswedan.

25

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi se-Indonesia tahun 2020, diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

26

Terbaik Nasional Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tahun 2020 untuk 3 kategori, yaitu IPK terbaik peringkat pertama berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang, IPK terbaik pada Indikator Utama Kesempatan Kerja dan IPK terbaik pada Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja, diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.



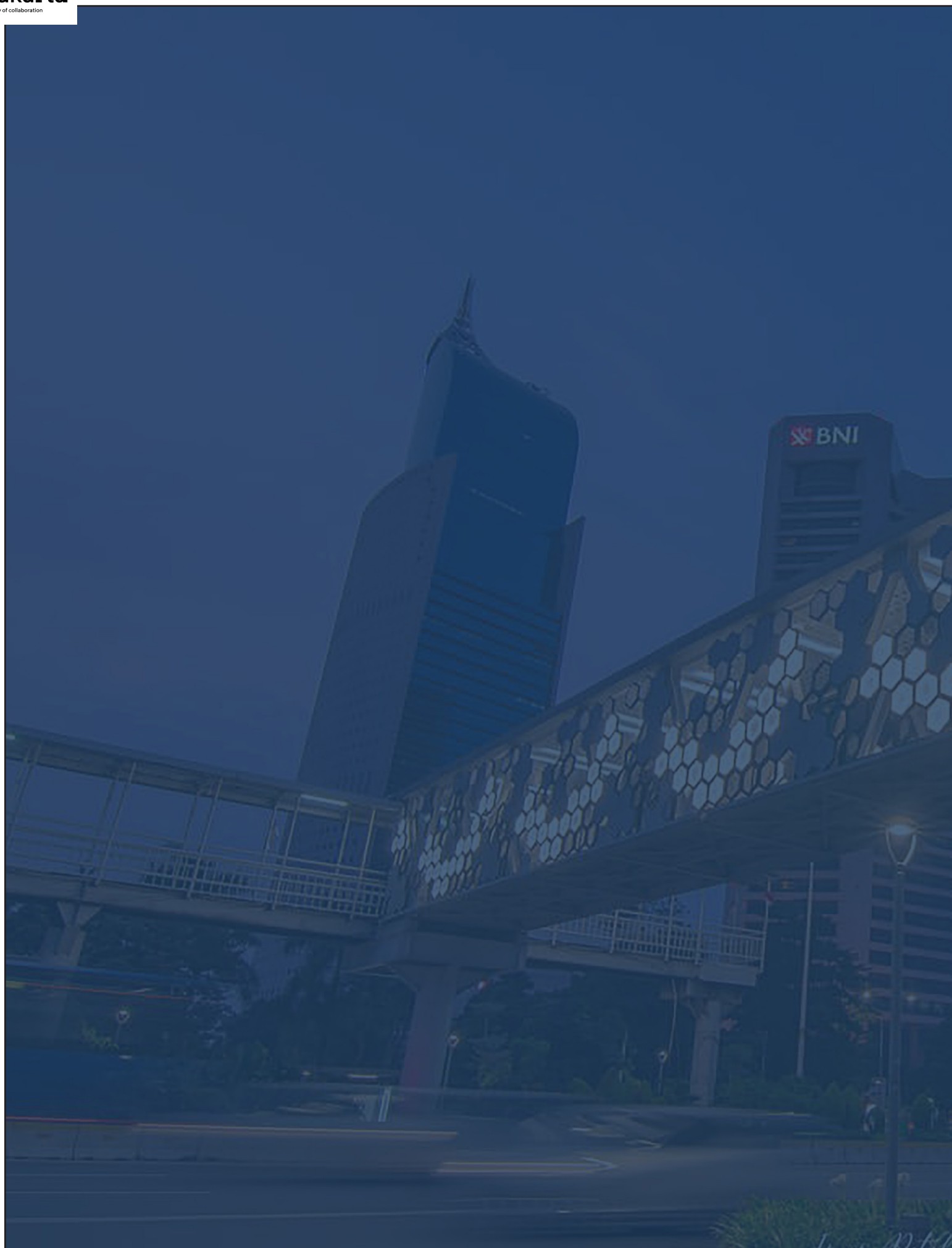


# SCAN ME



Silahkan scan QR Code di atas untuk melihat video penghargaan Pemprov DKI Jakarta 2020,

SCAN CODE  
SCAN CODE  
SCAN CODE



# BAB IV

# PENUTUP

# KESIMPULAN

Pelaksanaan rencana kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang besar dengan munculnya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlunya refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di sisi lain, pandemi juga mengakibatkan kontraksi ekonomi masyarakat global, termasuk warga DKI Jakarta. Akibatnya, sejumlah indikator kinerja gagal dicapai, antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Cakupan Pelayanan Air Bersih, Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum, dan Realisasi Nilai Investasi. Dari sisi output, indikator kinerja Jumlah Kawasan Permukiman RW Kumuh juga

mengalami tekanan dari target penataan pada 56 RW hanya terealisasi pada 11 RW. Namun demikian, indikator kinerja ini bersifat kumulatif dan pada aras outcome jangka menengah realisasinya hingga tahun 2020 masih sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dari sisi anggaran, di tengah perubahan asumsi anggaran dan *refocusing* dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, realisasi anggaran dalam rangka mewujudkan 10 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2020 telah tercapai 93,97%. Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar 5,63% atau nilai efisiensi sebesar 64,08%.

# RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan pandemi Covid-19 yang masih diproyeksikan masih akan berlanjut pada tahun 2021, maka dibutuhkan sejumlah langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

**01** Mendorong *new way of working* berbasis digital dalam rangka efisiensi pelaksanaan kegiatan di tengah tekanan fiskal. NWO ini juga dapat menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan.

**02** Sebagai bagian dari *refocusing* dalam rangka penanganan Covid-19, perlu juga dilakukan *refocusing* dalam kerangka pencapaian sasaran strategis Provinsi DKI Jakarta sehingga target-target yang telah

ditetapkan untuk jangka menengah tidak terbengkalai sepenuhnya.

**03** Penguatan Sistem Manajemen Kinerja perlu terus dilakukan dengan memastikan interoperabilitas data dan layanan dari sistem informasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penajaman pada indikator tujuan strategis di setiap OPD merupakan prioritas pada sisi perencanaan kinerja.





# LAMPIRAN

# TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN RPJMD 2017-2022

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	1	Indeks Potensi Kerawanan Sosial	Nilai	25,52
2	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	2	Prevelensi Kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Persen	36,3
		3	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	95,18
3	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	4	Indeks Kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	Nilai	4,97
4	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	79,60
5	terwujudnya keluarga sejahtera	6	Total Fertility Rate	Nilai	2,20
6	Berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,10
7	Meningkatnya kewirausahaan baru	8	Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan	Wirausaha	73.453
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	9	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	Ketersediaan 100%
					Skor PPH 80.5
9	berkurangnya kesenjangan sosial	10	Gini Ratio	Nilai	0,409
10	terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	11	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,78
11	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	12	Jumlah Titik Genangan Banjir	Titik	15
12	meningkatnya akses sanitasi layak	13	Cakupan Pelayanan Air Bersih	Persen	60,99
		14	Cakupan Pelayanan Air Limbah	Persen	14,33
		15	Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	Persen	11
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	16	Jumlah Titik Macet	titik	155

	Target Tahunan					Realisasi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020
	24,97	24,95	22,19	22	22,47	n/a	16,25	16,25
	35,52	34,74	33,96	33,18	32,4	n/a	14,6	14,6
	95,39	95,59	95,79	96	96,2	94,7	94,7	94,70
	5,28	6,08	6,13	7,32	7,91	5,69	2,32	6,43
	80,00	80,40	80,80	81,20	81,60	80,47	80,76	80,77
	2,18	2,15	2,13	2,12	2,11	2,20	2,45	2,45
	5,20	5,10	5,00	4,90	4,80	6,24	6,54	10,95
	19.304	46.554	46.554	46.554	46.552	18.230	15.200	85.746
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skor PPH 81	82	83	Skor PPH 84	Skor PPH 85	Skor PPH 86.5	90,8	88,2	
	0,407	0,405	0,403	0,401	0,399	0,39	0,39	0,40
	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	3,55	3,42	4,69
	12	7	6	5	0	11	5	4
	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	60,33	63,16	64,33
	15,93	17,04	20,49	23	26,44	21,17	16,73	17,75
	14	17	20	23	26	12,4	17,08	20,03
	140	116	85	47	0	140	116	85

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal
		17	Persentase Perjalanan Penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	Persen	18
14	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	18	Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	Megawat	0
15	Tersedianya hunia yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	19	Jumlah Backlog Hunian	Unit	302.319
16	Meningkatnya pertumbuhan investasi	20	Realisasi Nilai Investasi	Triliun Rp	55,00
17	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	21	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persen	43
18	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	22	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	89,94
		23	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Persen	50
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	24	Nilai /Predikat AKIP	predikat	B
		25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0
		26	Skor EKPPD	Persen	3,056
		27	Opini Laporan Keuangan Daerah	predikat	WDP
		28	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persen	0
		29	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,75
20	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	30	Indeks E-Gov (Indeks SPBE)	Nilai	3,39
21	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	31	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	36,41
22	Meningkatnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)	32	Penambahan Ratio RTH	Persen	0,18
23	Melambatnya penurunan muka tanah	33	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Persen	0
24	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	34	Jumlah Kawasan Pemukiman Kumuh	RW	223

Target Tahunan					Realisasi		
2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020
20	22	25	28	30	15	21,7	8,2
0	0,6	0,6	0,6	1,6	0	0,866	0,866
294.756	293.290	291.696	290.584	287.755	294,756	294,756	291.696
93,10	100,20	110,00	115,90	124,50	114,20	123,90	95
42	41	40	39	38	29	26	28,38
89,95	89,96	89,97	89,99	90	73	84,96	74,06
52	54	56	58	60	55	55	55
A	A	A	AA	AA	BB (71.04)	BB (73.9)	n/a
80	83	86	88	88,5	83,76	84,41	86,34
3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,1712	3,1712	3,2374
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	20	20	20	20	80,4	80,4	80,4
68	73	78	85	91	70,92	74,57	n/a
3,35	3,4	3,45	3,5	3,55	3,41	3,41	3,41
36,77	37,14	37,51	37,89	38,27	39,01	40,92	39,01
0,0665	0,0351	0,0351	0,0351	0,0351	0,072	0,0328	0,0346
4,3	4,185	4,099	3,985	3,87	1,81	1,65	1,81
223	221	147	84	23	217	157	147

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal
25	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	35	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dapat diimplementasikan	Inovasi	-
26	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	36	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85
27	terwujudnya jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	37	Jumlah Wisatawan	orang	35.600.000
28	terwujudnya pelestarian kebudayaan	38	Jumlah Pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	event	24
29	terwujudnya pelestarian cagar budaya	39	jumlah cagar budaya yang dikonversi	objek	11

Target Tahunan					Realisasi		
2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020
1	2	2	2	2	1	2	1
73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	85,08	84,08	88,29
38.800.000	41.460.000	43.583.000	47.539.350	53.575.417	37.005.988	44.342.335	7.562.667
25	26	27	28	29	38	26	38
11	10	8	7	4	18	18	18

# **KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR: 280 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

**KESATU :** Menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
  
**ANIES BASWEDAN**

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 280 TAHUN 2020  
Tanggal 3 Maret 2020

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN : 2020

A. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaminnya akses dan layanan Pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,80
2	Berkurangnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00 %
3	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83
4	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	3,18%
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Jumlah titik genangan banjir	6
6	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Cakupan pelayanan air bersih	66,09%
		2	Persentase penurunan volume sampah di kota	20%
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga	1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum ( <i>Public Transportation Modal Share</i> )	25%
8	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Realisasi Nilai Investasi	Rp 107,8 triliun
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Nilai/Predikat AKIP	A
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
10	Terwujudnya Kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	147 RW

B. Program dan Sumber Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	74.546.796.094	APBD
2	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	15.361.661.361	APBD
3	Program Wajib Belajar 12 Tahun	3.196.860.981.380	APBD
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	87.740.312.249	APBD
5	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	1.487.721.643.914	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.308.049.493.364	APBD
7	Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan	34.987.969.111	APBD
8	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	2.379.030.950.000	APBD
9	Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	2.970.875.603.377	APBD
10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan	82.671.245.840	APBD
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1.559.956.696.522	APBD
12	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan	865.385.136.366	APBD
13	Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka	26.563.336.348	APBD
14	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	680.580.698.600	APBD
15	Program Pemberdayaan Masyarakat	482.553.935.353	APBD
16	Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan	11.402.096.215	APBD
17	Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	103.723.671.629	APBD
18	Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis	3.138.208.000	APBD
19	Program Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan	2.425.315.517	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	34.877.050.508	APBD
21	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	154.143.103.306	APBD
22	Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan	30.170.700.865	APBD
23	Program Penanganan Fakir Miskin	59.363.057.413	APBD
24	Program Pengendak Banjir dan Abrasi	2.746.792.247.998	APBD
25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	208.641.464.822	APBD
26	Program Pengelolaan Persampahan	2.025.228.045.750	APBD
27	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum	663.076.713.846	APBD
28	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	344.873.074.289	APBD
29	Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	74.886.984.368	APBD
30	Program Peningkatan Penanaman Modal	7.718.737.692	APBD
31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	126.412.372.242	APBD
32	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD	17.405.799.880	APBD
33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	22.815.994.141	APBD
34	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.845.355.712	APBD
35	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.446.039.737	APBD
36	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah	92.187.819	APBD
37	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra	137.100.000	APBD
38	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan	370.250.000	APBD
39	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian	125.300.000	APBD
40	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH	109.200.000	APBD
41	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Wilayah	7.957.970.736	APBD
42	Program Pengelolaan Pemakaman	362.960.270.749	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
43	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	11.330.233.183	APBD
44	Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun	44.732.416.304	APBD
45	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik	154.280.655.881	APBD
46	Program Penataan Administrasi Kependudukan	117.077.719.367	APBD
47	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara	2.689.127.752	APBD
48	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara	189.123.661.613	APBD
49	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara	363.485.596.228	APBD
50	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat	383.468.853.275	APBD
51	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat	3.339.053.121	APBD
52	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat	228.869.037.869	APBD
53	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat	2.000.009.023	APBD
54	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	167.532.315.136	APBD
55	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat	273.397.728.552	APBD
56	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.336.823.418	APBD
57	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	224.868.443.839	APBD
58	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	534.119.444.674	APBD
59	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur	301.181.161.088	APBD
60	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur	3.087.575.591	APBD
61	Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur	496.337.930.310	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
62	Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	3.539.799.040	APBD
63	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	9.593.081.102	APBD
64	Program Peningkatan Pengeinbangan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	59.775.407.012	APBD
65	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	180.781.300	APBD
66	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan	1.164.912.288	APBD
67	Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual	8.166.230.191	APBD
68	Program Pemanfaatan Aset Daerah	435.469.500	APBD
69	Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah	57.120.515.982	APBD
70	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	426.403.679.577	APBD
71	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	36.445.097.375	APBD
72	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa	7.470.974.395	APBD
73	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	18.035.505.826	APBD
74	Program Penataan Kawasan Permukiman	797.107.302.192	APBD



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

